

# LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal (UU No.18 Tahun 2012).

Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 pilar yaitu : (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan. Pilar tersebut diwujudkan dengan : (1) memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dan teknologi spesifik local dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal untu kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat; dan (4) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten melalui sumber dana APBD terus berupaya mendorong pemantapan ketahanan pangan melalui program dan kegiatan yang dijabarkan dalam Renja Tahun 2023. Untuk mengetahui perkembanganpelaksanaan program dan kegiatan tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk memberikan informasi tingkat capaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di bidang urusan pangan di wilayah Banten.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Capaian Kinerja ini adalah sebagai implementasi amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenaga Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan kinerja, sebagai laporan dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang digunakan untuk mencapai target kinerja diukur berdasarkan realisasi data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, diikhtisarkan, sesuai dengan sasaran strategis untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

### **1.3 Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pambangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2);

20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
21. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang RENSTRA;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

#### **1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Bab II, Pasal 2). Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipologi B menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah No. 8/2016, Paragraf 20, Pasal 116, ayat 1 dan 2), Kemudian diubah dalam Pergub No. 48/2022, Paragraf 1, Pasal 60, Ayat 1 dan 2, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi (Pergub No. 48/2022 Paragraf 3, Pasal 62).

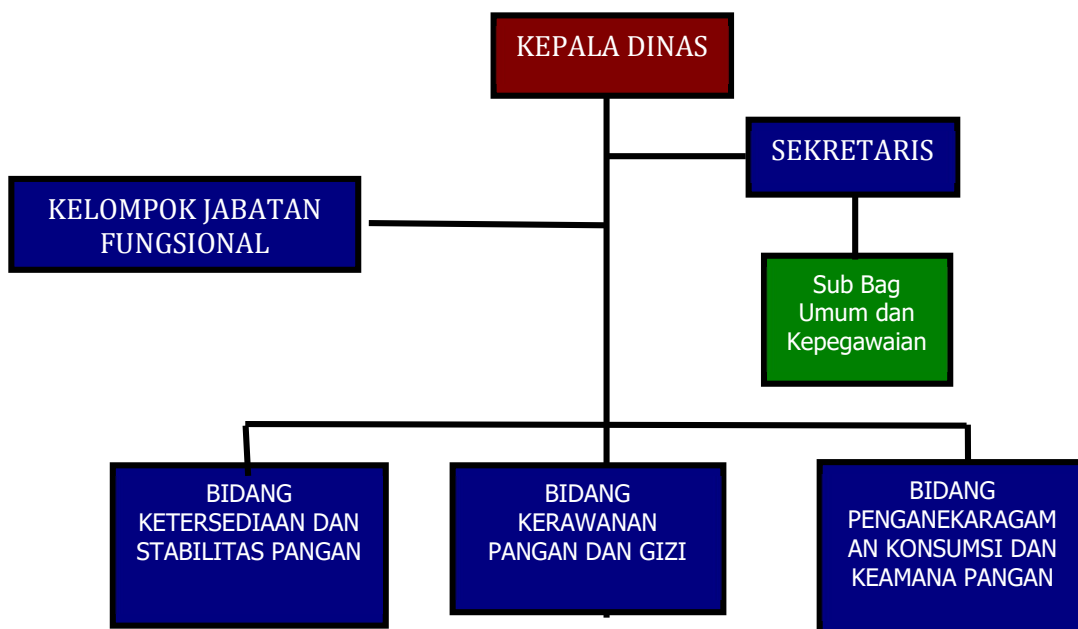
Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Paragraf 2, Pasal 61) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan;
- d. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
- e. Kepala Bidang Pengakeneragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut (Pergub No. 48/2022, Paragraf 3, Pasal 62):

- (a) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- (b) Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- (c) Penanganan Kerawanan Pangan;
- (d) Pengawasan Keamanan Pangan; Dan
- (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.  
Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan  
(Lampiran PERGUB No. 48 Tahun 2022)



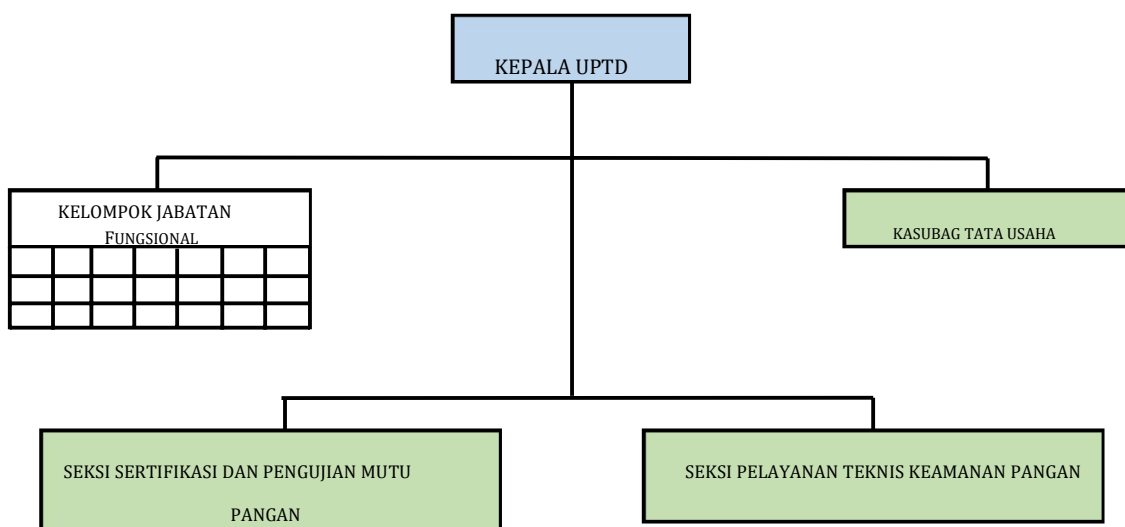
Seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dimana telah ditetapkan UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Ketahanan Pangan dibidang pelayanan teknis keamanan pangan, sertifikasi dan pengujian mutu pangan, sementara tugas pokoknya yaitu:

- a. Pelaksanaan dan pelayanan teknis pengujian keamanan mutu pangan segar;
- b. Pelaksanaan Sosialisasi standar residu pestisida di Bawah Minimum Residu (BMR), Good Handling Practice (GHP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Nasional Indonesia (SNI), Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP), rekomendasi ekspor pangan segar, produk dalam, registrasi rumah kemasan dan dokumentasi sistim mutu;
- c. Pelaksanaan Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC), Audit Internal Mutu Pangan dan Good Agriculture Practices (GAP);
- d. Pelayanan Rekomendasi sertifikasi keamanan pangan segar dan rekomendasi ekspor pangan segar;
- e. Pelayanan verifikasi hasil analisis laboratorium dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); dan
- f. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan pelaporan.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan;
- d. Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 2.  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
BANTEN



**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2024

Penetapan kinerja tahun 2024 merupakan tahun ke-2 Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Sasaran, Program dan Indikator Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024**

No	Sasaran	Program	Indikator Program	Target
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan (Skor)	71,29
		Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedualatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%)	100
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (%)	88
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	50
		Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	70-80

B. Kebijakan Program dan Kegiatan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Outcome yang harus dicapai yaitu : Capaian SAKIP Perangkat Daerah sebesar 70-80. Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan antara lain :
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan; dan
- 9) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

**Tabel II.2**  
**Sasaran Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

**Dinas**

NO	SASARAN PRORAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM DAN KEGIATAN )	SATUAN	TARGET
<b>1</b>	<b>Sasaran Program : Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu dan terfasilitasinya Urusan Dinas Ketahanan Pangan tepat waktu</b>	<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>76</b>
	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terukur dan tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase ketercapaian Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100

**UPTD**

NO	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Satuan	Target
<b>1</b>	<b>Sasaran Program : Terfasilitasinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai</b>	<b>76</b>
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100

2. Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (100%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi

**Tabel II.3**  
**Sasaran Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Satuan	Target
1	<b>Sasaran Program :</b> <b>Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</b>	<b>Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persen	100

3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Outcome yang harus dicapai adalah Skor Pola Pangan Harapan (88%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi; dan
- 3) Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

**Tabel II.4**  
**Sasaran Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Satuan	Target
1.	<b>Sasaran Program : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Beragam dan Seimbang</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>	<b>Persen</b>	<b>88</b>
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan efektif, efisien dan tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persen	100

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Satuan	Target
1	<b>Sasaran Program : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Beragam dan Seimbang</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>	<b>Persen</b>	<b>88</b>
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi yang akurat dan tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persen	100

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan, Outcome yang harus dicapai adalah Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (50 %), capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi; dan
- 2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.

**Tabel II.5**  
**Sasaran Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

2	<b>Sasaran Program : Tercapainya Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>
	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Dokumen	1
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi yang akurat dan tepat waktu	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persen	100

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan Pangan, Outcome : Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (50%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi;
- 2) Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- 3) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

**Tabel II.6**  
**Sasaran Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

2	<b>Sasaran Program :</b> Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat mutu keamanan pangan di peredaran	<b>Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan</b>	Persen	50
	Sasaran Kegiatan : Tercapainya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota akurat dan tepat waktu	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100



			Realisasi Kinerja SKPD													
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen			1	1			1					
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase ketercapaian Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah</b>													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.862.925.726	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	390.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.500.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			3			4			2			2
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen									1			2
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen									1			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen			4			5			4			5
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>													
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.878.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang						80						



	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Listrik	650.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.310.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			4									8
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	311.662.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit			9			9			8			10
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.855.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit			24			26			22			25
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.949.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1									
<b>PROGRAM PENGELOLA SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>																
<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi</b>			<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi</b>													
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	50.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan					1							

<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>																
<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>			<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>													
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	616.726.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan												1
	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	92.192.000	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan							1					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	300.000.000	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan											1	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	100.000.000	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	44 Unit						44						
	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah	75.000.000	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan										1		
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	50.000.000	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen					1							
<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>			<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>													
	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	300.000.000	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	200 Ton						200						







	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit						14		4		7		
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN UPTD</b>																
<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD</b>			<b>Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>													
	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100.000.000	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	15 Sertifikat		2				3		5		2	3	
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	50.000.000	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	30 Dokumen		14				3			9			4
	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	15 Dokumen			4			5			2			4

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Realisasi Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya adalah sebagai berikut :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**, dengan sasaran untuk Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

1. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah(100%);
2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (100%);
3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%);
4. Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%).

Program ini diimplementasikan melalui :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **260.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 77.812.000,00** atau **29,93%** dan capaian fisik mencapai **43,08%**.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **19.303.425.726,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.639.953.977,00** atau **39,58%** dan capaian fisik mencapai **40,56%**
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, dimana input anggaran sebesar **Rp. 74.878.500,00** dengan realisasi sebesar Rp. **900.000,00** atau **1,20%** dan capaian fisik mencapai **2,78%**
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **863.973.800,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 365.977.197,00** atau **42,36%** dan capaian fisik mencapai **44,44%**.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **1.963.630.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 681.073.817,00** atau 34,68% dan capaian fisik mencapai **42,40%**.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **475.466.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 195.072.600,00** atau **41,03%** dan capaian fisik mencapai **50,02%**.
7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD), dimana Input Anggaran sebesar Rp. **164.150.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 49.839.377,00** atau **3,02%** dan capaian fisik mencapai **28,61%**.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD), dimana Input Anggaran sebesar Rp. **67.930.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.018.900,00** atau **10,33%** dan capaian fisik mencapai **11,53%**
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD), dimana Input Anggaran sebesar Rp. **3.630.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 840.000,00** atau **16,25,00%** dan capaian fisik mencapai **13,00%**.

**Tabel III.1**

Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja (lampiran-1)

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosen tase Anggaran A = B : R. SLIR	Target Triwulan			Realisasi Triwulan		Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN (UNIT INDUK)</b>		100,00		30.255.378.026,00	<b>0,99</b>	25,12		7.681.342.342,00	23,92		5.110.180.343,00	95,23	66,53	45,69		7.772.235.092,00	45,69	25,69
<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>		100,00		30.255.378.026,00	<b>1,00</b>	25,12		7.681.342.342,00	23,92		5.110.180.343,00	95,23	66,53	45,69		7.772.235.092,00	45,69	25,69
<b>2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		100,00		22.941.374.026,00	<b>0,76</b>	26,94		6.202.962.742,00	26,23		4.294.108.904,00	97,34	69,23	52,68		6.930.503.653,00	52,68	30,21
2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00		260.000.000,00	<b>0,01</b>	20,79		54.192.000,00	20,61		92.360.000,00	99,13	106,45	44,71		92.360.000,00	<b>44,71</b>	35,52
2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	100,00	2	73.000.000,00	<b>0,28</b>	16,32	0	11.892.000,00	15,67	0	1.890.000,00	96,01	15,89	63,26	0	19.200.000,00	63,26	26,30
	Penyusunan Renja 2025	100,00	1	48.652.000,00	0,67	19,10	0	9.292.000,00	18,13	0	1.890.000,00	94,91	20,34	89,16	0	16.110.000,00	89,16	33,11
	Penyusunan Renja Perubahan 2024	100,00	1	24.348.000,00	0,33	10,68	0	2.600.000,00	10,68	0	0,00	100,00	0,00	10,68	0	3.090.000,00	10,68	12,69
2.09.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	100,00	2	12.000.000,00	<b>0,05</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Laporan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025	100,00	1	9.840.000,00	0,82	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2025	100,00	1	2.160.000,00	0,18	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	100,00	2	12.000.000,00	<b>0,05</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Laporan Dokumen Perubahan Anggaran 2024	100,00	1	9.840.000,00	0,82	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2024	100,00	1	2.160.000,00	0,18	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	100,00	2	10.000.000,00	<b>0,04</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Dokumen DPA -SKPD 2025	100,00	1	7.560.000,00	0,76	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tahun 2025	100,00	1	2.440.000,00	0,24	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	100,00	2	10.000.000,00	<b>0,04</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Laporan Dokumen Anggaran Perubahan DPA 2024	100,00	1	7.560.000,00	0,76	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tahun 2024	100,00	1	2.440.000,00	0,24	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

**Tabel III**  
**Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja (lampiran-2)**

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
		4	5	6	A = B : 6 SJR	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Satuan: Laporan)	100,00	12	85.000.000,00	0,33	29,39	3	24.980.000,00	29,39	3	22.920.000,00	100,00	91,75	47,95	6	32.480.000,00	47,95	38,21
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	12	85.000.000,00	1,00	29,39	3	24.980.000,00	29,39	3	22.920.000,00	100,00	91,75	47,95	6	32.480.000,00	47,95	38,21
2.09.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	100,00	3	58.000.000,00	0,22	29,64	0	17.320.000,00	29,65	0	32.880.000,00	100,02	189,84	50,81	1	40.680.000,00	50,81	70,14
	Penyusunan LKIP-LKP-JLPPD Tahun 2024	100,00	1	41.240.000,00	0,71	32,59	0	13.440.000,00	32,60	0	29.280.000,00	100,03	217,86	39,87	0	32.280.000,00	39,87	78,27
	Penyusunan Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Buku Statistik Ketahanan Pangan	100,00	1	7.760.000,00	0,13	50,00	0	3.880.000,00	50,00	0	0,00	100,00	0,00	50,00	0	0,00	50,00	0,00
	Sosialisasi DPR/MRISPP	100,00	1	9.000.000,00	0,16	0,00	0	0,00	0	0	3.600.000,00		∞	100,00	1	8.400.000,00	100,00	93,33
2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100,00		19.303.425.726,00	0,84	27,00		5.208.548.042,00	27,01		5.613.200.959,00	100,04	70,36	53,84		5.613.200.959,00	53,84	29,08
2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: Orang/ Bulan)	100,00	60	18.862.925.726,00	0,98	27,04	0	5.099.750.042,00	27,05	0	3.528.935.555,00	100,04	69,20	54,09	0	5.417.814.959,00	54,09	28,72
	Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	60	18.862.925.726,00	1,00	27,04	0	5.099.750.042,00	27,05	0	3.528.935.555,00	100,04	69,20	54,09	0	5.417.814.959,00	54,09	28,72
2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	100,00	12	390.000.000,00	0,02	24,98	3	97.410.000,00	24,99	3	135.270.000,00	100,04	138,87	41,65	5	188.290.000,00	41,65	48,28
	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	12	390.000.000,00	1,00	24,98	3	97.410.000,00	24,99	3	135.270.000,00	100,04	138,87	41,65	5	188.290.000,00	41,65	48,28
2.09.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	100,00	12	15.500.000,00	0,00	24,62	4	3.792.000,00	24,61	4	640.000,00	99,99	16,88	64,11	7	1.920.000,00	64,11	12,39
	Penyusunan Laporan Pajak	100,00	1	4.112.000,00	0,27	0,00	0	0,00	0	0,00		NaN	100,00	1	0,00	100,00	0,00	
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Prognosis)	100,00	2	3.708.000,00	0,24	50,48	1	1.872.000,00	50,49	1	0,00	100,02	0,00	50,49	1	0,00	50,49	0,00
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Bulanan	100,00	9	7.680.000,00	0,50	25,00	3	1.920.000,00	24,99	3	640.000,00	99,96	33,33	49,99	5	1.920.000,00	49,99	25,00
2.09.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	100,00	2	3.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Penyusunan laporan Keuangan Tahunan	100,00	2	3.500.000,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	100,00	1	3.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00	1	3.500.000,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
2.09.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	100,00	18	28.000.000,00	0,00	27,41	5	7.596.000,00	21,01	5	0,00	76,64	0,00	41,87	9	5.176.000,00	41,87	18,49
	Penyusunan Laporan Realisasi SPM	100,00	4	4.648.000,00	0,17	25,39	1	1.180.000,00	0,25	1	0,00	1,00	0,00	24,86	2	1.144.000,00	24,86	24,61
	Penyusunan Laporan Realisasi SP2D	100,00	4	4.648.000,00	0,17	25,39	1	1.180.000,00	25,39	1	0,00	100,00	0,00	50,00	2	1.144.000,00	50,00	24,61
	Penyusunan Laporan Pajak	100,00	4	11.848.000,00	0,42	25,15	1	2.980.000,00	20,08	1	0,00	79,84	0,00	39,86	2	1.744.000,00	39,86	14,72
	Penyusunan Laporan Keuangan	100,00	2	2.208.000,00	0,08	48,73	1	1.076.000,00	48,73	1	0,00	100,00	0,00	48,73	1	0,00	48,73	0,00
	Penyusunan Laporan SPJ Fungsional	100,00	4	4.648.000,00	0,17	25,39	1	1.180.000,00	25,39	1	0,00	100,00	0,00	50,00	2	1.144.000,00	50,00	24,61

**Tabel III**  
**Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja (lampiran-3)**

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosen tase Anggaran A = 6 : 6 SLIR	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100,00		74.878.500,00	0,00	68,20		51.066.000,00	0,00		14.700.000,00	0,00	27,02	1,20		14.700.000,00	1,20	19,63
2.09.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	100,00	80	74.878.500,00	1,00	68,20	80	51.066.000,00	0,00	80	13.800.000,00	0,00	27,02	1,20	80	14.700.000,00	1,20	19,63
	Pelatihan Kursus Diklat dan Kapasitas Aparatur	100,00	80	74.878.500,00	1,00	68,20	80	51.066.000,00	0,00	80	13.800.000,00	0,00	27,02	1,20	80	14.700.000,00	1,20	19,63
2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100,00		863.973.800,00	0,04	29,69		256.747.000,00	17,50		339.444.150,00	58,96	67,00	45,47		339.444.150,00	45,47	39,29
2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	100,00	1	12.705.000,00	0,01	31,24	0	3.969.000,00	28,12	0	3.820.000,00	90,00	96,25	55,90	0	7.225.000,00	55,90	56,87
	Alat Listrik dan Penerangan	100,00	1	12.705.000,00	1,00	31,24	0	3.969.000,00	28,12	0	3.820.000,00	90,00	96,25	55,90	0	7.225.000,00	55,90	56,87
2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	100,00	1	127.914.000,00	0,15	0,00	0	0,00	0	0	0,00		NaN	83,71	1	104.907.150,00	83,71	82,01
	Alat Tulis Kantor	100,00	1	127.914.000,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		NaN	83,71	1	104.907.150,00	83,71	82,01
2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	100,00	1	300.000.000,00	0,35	37,11	0	111.320.000,00	17,37	0	100.331.000,00	46,81	90,13	38,21	0	146.152.000,00	38,21	48,72
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	1	300.000.000,00	1,00	37,11	0	111.320.000,00	17,37	0	100.331.000,00	46,81	90,13	38,21	0	146.152.000,00	38,21	48,72
2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	100,00	1	60.500.000,00	0,07	60,98	1	36.890.000,00	10,07	1	35.940.000,00	16,51	97,42	12,72	1	39.140.000,00	12,72	64,69
	Cetak Alat Tulis Kantor	100,00	1	60.500.000,00	1,00	60,98	1	36.890.000,00	10,07	1	35.940.000,00	16,51	97,42	12,72	1	39.140.000,00	12,72	64,69
2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	100,00	1	15.000.000,00	0,02	25,00	0	3.750.000,00	25,00	0	3.250.000,00	100,00	86,67	50,00	0	6.625.000,00	50,00	44,17
	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100,00	1	15.000.000,00	1,00	25,00	0	3.750.000,00	25,00	0	3.250.000,00	100,00	86,67	50,00	0	6.625.000,00	50,00	44,17
2.09.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Satuan: Paket)	100,00	1	20.000.000,00	0,02	0,00	0	0,00	0	0	0,00		NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Acara/Pameran	100,00	1	20.000.000,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	100,00	1	320.854.800,00	0,37	31,40	0	100.818.000,00	26,86	0	28.688.000,00	85,54	28,46	43,51	0	28.688.000,00	43,51	8,94
	Perjalanan Dinas Biasa - Luar Provinsi	100,00	0	150.534.800,00	0,47	21,32	0	32.096.000,00	19,50	0	5.400.000,00	91,46	16,82	39,03	0	5.400.000,00	39,03	3,59
	Perjalanan Dinas Biasa - Dalam Provinsi	100,00	1	164.620.000,00	0,51	40,47	0	66.622.000,00	33,50	0	22.538.000,00	82,78	33,83	47,64	0	22.538.000,00	47,64	13,69
	Perjalanan Dinas Dalam Kota	100,00	0	5.700.000,00	0,02	36,84	0	2.100.000,00	30,27	0	750.000,00	82,17	35,71	43,43	0	750.000,00	43,43	13,16
2.09.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen)	100,00	1	7.000.000,00	0,01	0,00	0	0,00	0	0	0,00		NaN	99,30	1	6.707.000,00	99,30	95,81
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00	1	7.000.000,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		NaN	99,30	1	6.707.000,00	99,30	95,81
2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00		1.963.630.000,00	0,09	27,16		531.774.200,00	25,48		686.514.943,00	93,82	72,54	45,24		686.514.943,00	45,24	34,96
2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Dokumen)	100,00	1	3.630.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		NaN	100,00	1	3.630.000,00	100,00	100,00
	Benda Pos	100,00	1	3.630.000,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00		NaN	100,00	1	3.630.000,00	100,00	100,00
2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	100,00	12	650.000.000,00	0,33	22,36	3	145.316.000,00	17,32	3	33.898.113,00	77,46	23,33	34,97	6	87.964.973,00	34,97	13,53
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	12	650.000.000,00	1,00	22,36	3	145.316.000,00	17,32	3	33.898.113,00	77,46	23,33	34,97	6	87.964.973,00	34,97	13,53

**Tabel III**  
**Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja (lampiran-4)**

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosen tase Anggar an A = B : 6 SLR	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	100,00	12	1.310.000.000,00	0,67	29,52	0	386.458.200,00	29,50	0	351.846.235,00	99,92	91,04	50,30	4	594.919.970,00	50,30	45,41
	Pelaksanaan Senam dan Cetak Laporan	100,00	3	14.691.700,00	0,01	20,93	0	3.075.000,00	18,34	0	3.075.000,00	87,65	100,00	39,28	1	6.150.000,00	39,28	41,86
	Pembayaran Honor Tenaga Administrasi, Keamanan, dan Supir	100,00	3	893.880.000,00	0,68	29,43	0	263.070.000,00	29,43	0	244.480.000,00	100,00	92,93	51,02	1	418.080.000,00	51,02	46,77
	Pembayaran Honor Tenaga Kebersihan	100,00	3	66.664.000,00	0,05	25,00	0	16.666.000,00	25,00	0	11.545.000,00	100,00	69,27	42,18	1	19.545.000,00	42,18	29,32
	Pembayaran Tenaga Pelayanan Umum	100,00	3	334.764.300,00	0,26	30,96	0	103.647.200,00	30,97	0	92.746.235,00	100,03	89,48	50,40	1	151.144.970,00	50,40	45,15
2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	100,00		475.466.000,00	0,02	21,23		100.635.500,00	16,98		184.283.601,00	80,00	0,00	55,65		184.283.601,00	55,65	38,76
2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit)	100,00	36	311.662.000,00	0,66	25,01	9	77.948.000,00	20,01	9	1,00	80,00	0,00	45,02	18	77.770.601,00	45,02	24,95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	36	311.662.000,00	1,00	25,01	9	77.948.000,00	20,01	9	1,00	80,00	0,00	45,02	18	77.770.601,00	45,02	24,95
2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	100,00	97	76.855.000,00	0,16	29,52	26	22.687.500,00	23,62	26	0,00	80,00	0,00	49,74	50	20.073.500,00	49,74	26,12
	Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	97	76.855.000,00	1,00	29,52	26	22.687.500,00	23,62	26	0,00	80,00	0,00	49,74	50	20.073.500,00	49,74	26,12
2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	100,00	1	86.949.000,00	0,18	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	99,90	1	86.439.500,00	99,90	99,41	
	Pembayaran Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	100,00	1	86.949.000,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	99,90	1	86.439.500,00	99,90	99,41	

**Tabel III**  
**Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja (lampiran-5)**

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	4	5	6	A=6 : 6.SUR	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.09.0.00.0.00.01.0001	UPTD SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	100,00		435.710.000,00	0,01	38,27		165.957.500,00	17,12		33.295.703,00	44,73	20,06	27,30		56.938.463,00	27,30	13,07
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	100,00		435.710.000,00	1,00	38,27		165.957.500,00	17,12		33.295.703,00	44,73	20,06	27,30		56.938.463,00	27,30	13,07
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100,00		235.710.000,00	0,54	46,02		107.484.700,00	15,03		4.837.700,00	32,66	4,50	23,93		21.920.460,00	23,93	9,30
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00		164.150.000,00	0,70	50,60		82.948.700,00	14,21		18.137.260,00	28,08	3,41	24,60		18.137.260,00	24,60	11,05
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	1	5.000.000,00	0,03	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	NaN	99,04	1	4.827.000,00	99,04	96,54	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100,00	1	5.000.000,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	NaN	99,04	1	4.827.000,00	99,04	96,54	
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	3	31.000.000,00	0,19	100,00	3	31.000.000,00	23,72	0	0,00	23,72	0,00	23,72	0	0,00	23,72	0,00
	Penyediaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	100,00	3	31.000.000,00	1,00	100,00	3	31.000.000,00	23,72	0	0,00	23,72	0,00	23,72	0	0,00	23,72	0,00
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	8	38.000.000,00	0,23	46,15	3	17.537.200,00	27,06	2	1.682.000,00	58,63	9,59	44,02	2	6.639.500,00	44,02	17,47
	Penyediaan bahan logistik kantor	100,00	8	38.000.000,00	1,00	46,15	3	17.537.200,00	27,06	2	1.682.000,00	58,63	9,59	44,02	2	6.639.500,00	44,02	17,47
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	2	18.150.000,00	0,11	56,76	1	10.301.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16,14	0	2.929.760,00	16,14	16,14
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,00	2	18.150.000,00	1,00	56,76	1	10.301.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16,14	0	2.929.760,00	16,14	16,14
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	1	3.630.000,00	0,02	31,53	0	1.144.500,00	31,53	0	1.144.500,00	100,00	100,00	47,96	0	1.741.000,00	47,96	47,96
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00	1	3.630.000,00	1,00	31,53	0	1.144.500,00	31,53	0	1.144.500,00	100,00	100,00	47,96	0	1.741.000,00	47,96	47,96
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	2	68.370.000,00	0,42	33,59	1	22.966.000,00	6,77	0	0,00	20,15	0,00	10,15	0	2.000.000,00	10,15	2,93
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100,00	2	68.370.000,00	1,00	33,59	1	22.966.000,00	6,77	0	0,00	20,15	0,00	10,15	0	2.000.000,00	10,15	2,93
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00		3.630.000,00	0,02	28,93		1.050.000,00	4,82		500.000,00	16,66	23,81	27,57		500.000,00	27,57	13,77
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	12	3.630.000,00	1,00	28,93	3	1.050.000,00	4,82	2	250.000,00	16,66	23,81	27,57	4	500.000,00	27,57	13,77
	Penyediaan jasa surat menyurat	100,00	12	3.630.000,00	1,00	28,93	3	1.050.000,00	4,82	2	250.000,00	16,66	23,81	27,57	4	500.000,00	27,57	13,77
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00		67.930.000,00	0,29	34,58		23.486.000,00	17,21		3.283.200,00	49,76	7,50	21,22		3.283.200,00	21,22	4,83
2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00	2	39.930.000,00	0,59	35,57	0	14.204.000,00	25,36	0	1.761.200,00	71,30	12,40	32,16	0	3.283.200,00	32,16	8,22
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	100,00	2	39.930.000,00	1,00	35,57	0	14.204.000,00	25,36	0	1.761.200,00	71,30	12,40	32,16	0	3.283.200,00	32,16	8,22
2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	25	28.000.000,00	0,41	33,15	14	9.282.000,00	5,47	3	0,00	16,51	0,00	5,47	3	0,00	5,47	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	25	28.000.000,00	1,00	33,15	14	9.282.000,00	5,47	3	0,00	16,51	0,00	5,47	3	0,00	5,47	0,00

**Kendala dan Tindaklanjut :**

Tidak ada kendala pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan target dan kinerja

**II. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan,** Outcome yang harus dicapai adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (100%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi.

Program ini di implementasikan melalui pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi, dengan pagu input sebesar **Rp. 50.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 8.380.000,00** atau **16,76%** dan capaian fisik mencapai **92,02%**. Dengan sub kegiatan antara lain :

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik ;

Tabel.  
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	4	5	6	A = B : C SUR	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>		100,00		50.000.000,00	0,00	90,02		45.040.000,00	75,14		8.380.000,00	83,47	18,61	80,13		8.380.000,00	80,13	16,76
2.09.02.1.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	100,00		50.000.000,00	1,00	90,02		45.040.000,00	75,14		8.380.000,00	83,47	18,61	80,13		8.380.000,00	80,13	16,76
2.09.02.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Satuan: Laporan)	100,00	1	50.000.000,00	1,00	90,02	1	45.040.000,00	75,14	1	8.380.000,00	83,47	18,61	80,13	1	8.380.000,00	80,13	16,76
	Sosialisasi Kajian Peta Jalan Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan Tahun 2023	100,00	1	32.793.280,00	0,66	84,88	1	27.833.280,00	62,33	1	8.380.000,00	73,43	30,11	69,90	1	8.380.000,00	69,90	25,55
	Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Penyusunan Kajian Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	100,00	0	17.206.720,00	0,34	100,00	0	17.206.720,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00	100,00	0	0,00	100,00	0,00

**Kendala dan Tindakan Lanjut :**

Sosialisasi Peta jalan dan Rakor telah dilaksanakan, Tidak ada kendala pada Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, untuk capaian kinerja mencapai 90,08% dari target 95,04% capaian kinerja bulan Juni 2024, secara anggaran Terealisasi di bulan Juli 2024.

### III. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

**Masyarakat** , Outcome yang harus dicapai adalah Skor Pola Pangan Harapan (88%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan pagu input sebesar Rp. **1.233.918.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 162.682.290,00** atau **13,18%** terhadap pagu **dan capaian fisik mencapai 48,34%**, Dengan sub kegiatan antara lain :

- Penyediaan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal

Tabel.  
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosen tase Anggaran	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	4	5	6	A = 6 : 6 SUB	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>		100,00		5.459.004.000,00	<b>0,18</b>	22,68		1.255.009.600,00	19,47		705.541.439,00	85,87	56,22	27,94		717.141.439,00	27,94	13,14
2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100,00		1.233.918.000,00	<b>0,23</b>	31,27		391.540.000,00	27,32		146.542.290,00	87,38	34,46	46,17		146.542.290,00	<b>46,17</b>	11,88
2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Satuan: Laporan)	100,00	1	616.726.000,00	<b>0,50</b>	29,39	0	181.314.000,00	24,30	0	101.434.000,00	82,68	55,94	53,44	0	112.554.000,00	53,44	18,25
	Galari Pangan Murah	100,00	1	438.192.000,00	0,71	36,04	0	157.914.000,00	28,87	0	900.000,00	80,10	0,57	46,91	0	1.620.000,00	46,91	0,37
	Gerai Pangan Murah	100,00	0	178.534.000,00	0,29	13,11	0	23.400.000,00	13,11	0	100.534.000,00	100,00	429,63	69,42	0	110.934.000,00	69,42	62,14
2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Satuan: Laporan)	100,00	1	92.192.000,00	<b>0,07</b>	59,07	0	54.550.000,00	59,08	0	14.350.000,00	100,01	26,31	61,96	0	14.830.000,00	61,96	16,09
	Inventarisasi Data Pelaku Usaha Pangan Lokal Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten	100,00	0	24.990.000,00	0,27	93,72	0	23.420.000,00	93,72	0	0,00	100,00	0,00	94,35	0	0,00	94,35	0,00
	Pemetaan Data Pelaku Usaha Pangan Lokal Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten	100,00	0	41.482.000,00	0,45	75,04	0	31.130.000,00	75,05	0	14.350.000,00	100,01	46,10	81,08	0	14.830.000,00	81,08	35,75
	Sosialisasi Cluster Pelaku Usaha pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100,00	1	25.720.000,00	0,28	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis (Satuan: Laporan)	100,00	1	300.000.000,00	<b>0,24</b>	31,34	0	94.014.000,00	27,68	0	0,00	88,33	0,00	34,49	0	0,00	34,49	0,00
	Panel Harga	100,00	0	54.280.000,00	0,18	24,72	0	13.420.000,00	24,72	0	0,00	100,00	0,00	25,83	0	0,00	25,83	0,00
	Salgas Ketahanan Pangan	100,00	1	168.592.000,00	0,56	33,46	0	56.410.000,00	29,69	0	0,00	88,73	0,00	34,68	0	0,00	34,68	0,00
	Investigasi Dan Pemantauan/Monitoring Pasokan Dan Harga Pangan Lokal	100,00	0	77.128.000,00	0,26	31,36	0	24.184.000,00	25,42	0	0,00	81,04	0,00	40,08	0	0,00	40,08	0,00
2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Satuan: Unit)	100,00	44	100.000.000,00	<b>0,08</b>	28,18	44	28.382.000,00	26,64	44	19.158.290,00	94,52	67,50	51,64	44	19.158.290,00	51,64	19,16
	Bimtek Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 44 Unit Poktan/Gapoktan	100,00	44	22.310.000,00	0,22	100,00	44	22.310.000,00	100,00	44	0,00	100,00	0,00	100,00	44	0,00	100,00	0,00
	Sosialisasi Pemasaran Produk Pangan melalui E-Katalog	100,00	0	25.310.000,00	0,25	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Poktan/Gapoktan)	100,00	0	25.310.000,00	0,25	0,00	0	0,00	0	0	19.158.290,00	=	100,00	0	0	19.158.290,00	100,00	75,69
	Monev ke Kelompok Tani Poktan/Gapoktan	100,00	0	26.520.000,00	0,27	22,90	0	6.072.000,00	17,16	0	0,00	75,00	0,00	17,18	0	0,00	17,18	0,00
	Laporan Akhir Kegiatan	100,00	0	550.000,00	0,01	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Satuan: Laporan)	100,00	1	75.000.000,00	<b>0,06</b>	2,40	0	1.800.000,00	1,20	0	0,00	50,00	0,00	3,60	0	0,00	3,60	0,00
	Informasi Harga Pasar Strategis	100,00	1	75.000.000,00	1,00	2,40	0	1.800.000,00	1,20	0	0,00	50,00	0,00	3,60	0	0,00	3,60	0,00
2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Satuan: Dokumen)	100,00	1	50.000.000,00	<b>0,04</b>	62,96	1	31.480.000,00	54,78	1	0,00	87,01	0,00	62,19	1	0,00	62,19	0,00
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100,00	1	50.000.000,00	1,00	62,96	1	31.480.000,00	54,78	1	0,00	87,01	0,00	62,19	1	0,00	62,19	0,00

### **Kendala dan Tindak lanjut :**

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi kendala :

- a. Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal, telah dilaksanakan 2 pertemuan yaitu inventarisasi data pelaku usaha pangan okal kab/Kota se-provinsi banten, pemetaan data pelaku usaha pangan okal kab/Kota se-provinsi banten , serta koordinasi pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal ke kab. Tangerang, belum terealisasi secara anggaran masih dalam proses keuangan pada bulan Juli 2024
  - b. Belum maksimalnya data Inventarisasi Data Pelaku Usaha Pangan Lokal Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten
  - c. Panel Harga
  - d. Satgas Ketahanan Pangan
  - e. Belum dilaksanakannya Sosialisasi Cluster Pelaku Usaha pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  - f. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, dengan pagu input sebesar Rp. **2.950.086.000,00** dengan realisasi dari pagu anggaran sebesar **Rp. 26.790.000,00** atau **0,91%**, dan **capaian fisik mencapai 49,31%**, dengan sub kegiatan :
- a) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
  - b) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
  - c) Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Tabel.  
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosen tase Anggar an A = 6 : 6_SUB	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>		100,00		5.459.004.000,00	<b>0,18</b>	22,68		1.255.009.600,00	19,47		705.541.439,00	85,87	56,22	27,94		717.141.439,00	27,94	13,14
2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	100,00		2.950.086.000,00	<b>0,54</b>	11,18		338.584.000,00	10,41		9.550.001,00	93,15	2,82	11,25		9.550.001,00	<b>11,25</b>	0,32
2.09.03.1.02.0006 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Satuan: Ton)	100,00	200	300.000.000,00	<b>0,10</b>	96,88	200	291.022.000,00	92,65	75	0,00	95,63	0,00	94,82	75	0,00	94,82	0,00
	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	100,00	200	265.464.000,00	0,88	99,97	200	265.380.000,00	99,97	75	0,00	100,00	0,00	99,97	75	0,00	99,97	0,00
	Monev Penyaluran Cadangan Pangan	100,00	0	34.536.000,00	0,12	74,25	0	25.642.000,00	39,00	0	0,00	52,53	0,00	57,03	0	0,00	57,03	0,00
2.09.03.1.02.0007 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Satuan: Ton)	100,00	200	2.583.000.000,00	<b>0,88</b>	0,66	0	17.000.000,00	0,66	0	0,00	100,00	0,00	0,66	0	0,00	0,66	0,00
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100,00	200	2.583.000.000,00	1,00	0,66	0	17.000.000,00	0,66	0	0,00	100,00	0,00	0,66	0	0,00	0,66	0,00
2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Satuan: Laporan)	100,00	3	67.086.000,00	<b>0,02</b>	45,56	2	30.562.000,00	28,39	2	9.550.001,00	62,31	31,25	59,58	2	9.550.001,00	59,58	14,24
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	100,00	1	18.220.000,00	0,27	94,07	1	17.140.000,00	47,04	1	9.550.001,00	50,00	55,72	52,96	1	9.550.001,00	52,96	52,41
	Pengelolaan Data Cadangan Pangan	100,00	1	22.380.000,00	0,33	13,40	1	3.000.000,00	8,94	1	0,00	66,72	0,00	62,65	1	0,00	62,65	0,00
	Konsultasi Pengelolaan Cadangan Pangan	100,00	0	1.990.000,00	0,03	100,00	0	1.990.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Monitoring Evaluasi Cadangan Pangan	100,00	1	24.496.000,00	0,37	34,42	0	8.432.000,00	34,42	0	0,00	100,00	0,00	66,50	0	0,00	66,50	0,00

### Kendala dan Tindaklanjut :

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, kendala :

a. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Telah dilaksanakan penyaluran Cadangan Pangan sebanyak 75 Ton pada Bulan Januari dan Maret, namun terhadap realisasi anggaran terkendala penempatan kode rekening perjalanan dinas dari Perjalanan dinas kota ke biasa, sudah tindaklanjuti dengan pergeseran anggaran.

b. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, pelaksanaan pengadaan jasa tenaga pelayanan umum (rebag) pada proses pengadaan

3. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, dengan pagu input sebesar Rp **1.275.000.000,00** dengan realisasi terhadap pagu sebesar **Rp. 397.849.148,00** dari pagu anggaran atau **31,20%** dan capaian fisik mencapai **56,25%**, dengan sub kegiatan :

a) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.

Tabel.  
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosen tase Anggaran	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	4	5	6	A = 6 : 6 SUB	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>		100,00		5.459.004.000,00	<b>0,18</b>	22,68		1.255.009.600,00	19,47		705.541.439,00	85,87	56,22	27,94		717.141.439,00	27,94	13,14
2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	100,00		1.275.000.000,00	<b>0,23</b>	41,07		524.885.600,00	32,88		561.049.148,00	80,06	106,89	48,88		561.049.148,00	<b>48,88</b>	44,00
2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Satuan: Dokumen)	100,00	3	600.000.000,00	<b>0,47</b>	14,65	1	87.265.000,00	13,44	1	222.338.148,00	91,75	254,79	46,09	1	222.338.148,00	46,09	37,06
	Gerakan Menanam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Gose to Ponpes di Provinsi Banten	100,00	1	393.292.000,00	0,66	20,00	1	78.675.000,00	18,17	1	222.338.148,00	90,85	282,60	67,64	1	222.338.148,00	67,64	56,53
	Edukasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Berbasis Sumber Daya Lokal Bagi KWT	100,00	1	142.400.000,00	0,24	6,03	0	8.590.000,00	6,03	0	0,00	100,00	0,00	6,03	0	0,00	6,03	0,00
	Gerakan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada Pelaku UMKM	100,00	1	64.308.000,00	0,11	0,00	0	0,00	0	0	0,00		NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Satuan: Laporan)	100,00	4	600.000.000,00	<b>0,47</b>	71,40	2	429.796.600,00	55,18	2	338.711.000,00	77,29	78,81	56,58	2	338.711.000,00	56,58	56,45
	Gerakan Sadar konsumsi Pangan B2SA di Daerah Stunting di Provinsi Banten	100,00	2	245.578.000,00	0,41	77,56	1	190.457.600,00	54,02	1	175.511.000,00	69,65	92,15	54,02	1	175.511.000,00	54,02	71,47
	B2SA Goes To School Di Daerah Stunting Tahun 2024	100,00	1	106.633.000,00	0,18	0,00	0	0,00	0	0	0,00		NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Makanan Tambahan Bagi Anak Stunting di 8 Kab/Kota	100,00	1	247.789.000,00	0,41	96,59	1	239.339.000,00	80,57	1	163.200.000,00	83,42	68,19	83,98	1	163.200.000,00	83,98	65,86
2.09.03.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Satuan: Laporan)	100,00	2	75.000.000,00	<b>0,06</b>	10,49	0	7.824.000,00	10,49	0	0,00	100,00	0,00	10,49	0	0,00	10,49	0,00
	Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berdasarkan Pola	100,00	1	45.485.600,00	0,61	17,20	0	7.824.000,00	17,20	0	0,00	100,00	0,00	17,20	0	0,00	17,20	0,00
	Pembinaan dalam rangka Menganalisis Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kab/Kota	100,00	1	29.514.400,00	0,39	0,00	0	0,00	0	0	0,00		NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Kendala dan Tindaklanjut :

Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi alui Media Provinsi

- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal telah dilaksanakan kegiatan Pemanfaatan lahan pekarangan berbasis sumberdaya lokal 1 angkatan dengan penyaluran benih di 6 Pesantren, namun realisasi anggaran masih dalam proses pencairan pada Bulan Juli 2024
- Gerakan Menanam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Gose to Ponpes di Provinsi Banten, kendala pda pengadaan benih masih proses penunjukan PL
- Edukasi P2l berbasis sumber daya lokal bagi KWT belum

dilaksanakan dan ditindaklanjuti pada Triwulan III.

- d. Penyaluran bahan BMT untuk Daerah stunting 3 kali pada 8 Kab/kota sedangkan realisasi masih dalam proses keuangan, teralisasi pada Bulan Juli 2024
- e. Pada Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun telah dilaksanakan koordinasi kab. Subang dalam rangka studi komparasi penyusunan Laporan PPH,, pelaksanakan Bintek rencana pada Bulan Juli 2024.

**IV. Program Penanganan Rawan Pangan,** Outcome yang harus dicapai adalah Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (50%), capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi, dengan pagu input sebesar Rp **100.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 20.820.000,00 atau 20,82% dan capaian fisik mencapai 32,38%**; dengan sub kegiatan :  
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tabel  
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosen tase Anggaran	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	4	5	6	A = 6 : 6 SUB	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>		100,00		1.475.000.000,00	<b>0,05</b>	7,50		114.446.000,00	6,30		46.168.000,00	83,99	40,34	6,86		51.508.000,00	6,86	3,49
2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	100,00		100.000.000,00	<b>0,07</b>	24,05		23.680.000,00	24,05		20.820.000,00	100,00	79,22	26,14		20.820.000,00	<b>26,14</b>	20,82
2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Satuan: Dokumen)	100,00	1	100.000.000,00	<b>1,00</b>	24,05	0	23.680.000,00	24,05	0	18.760.000,00	100,00	79,22	26,14	0	20.820.000,00	26,14	20,82
	Sosialisasi/Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2024	100,00	0	23.620.000,00	0,24	91,28	0	21.560.000,00	91,28	0	18.760.000,00	100,00	87,01	100,00	0	20.820.000,00	100,00	88,15
	Pembentukan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024	100,00	0	34.680.000,00	0,35	6,11	0	2.120.000,00	6,11	0	0,00	100,00	0,00	6,11	0	0,00	6,11	0,00
	Validasi dan Review Data Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024	100,00	0	2.120.000,00	0,02	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Finalisasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024	100,00	0	2.120.000,00	0,02	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Launching dan Publikasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten tahun 2024	100,00	1	37.460.000,00	0,37	0,00	0	0,00	0	0	0,00	NaN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Kendala dan Tindak lanjut

Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota pelaksanaan Sosialisasi/koordinasi dan Bintek, SK Tim Penyusun FSVA dalam Proses Penandatanganan

- 2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi,

dengan pagu input sebesar Rp **1.375.000.000,00** dengan realisasi terhadap pagu sebesar **Rp. 32.268.000,00** atau **2,35%** dan **capaian fisik mencapai 15,95%** dengan sub kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
- b) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**Tabel 4**  
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosentase Anggaran A = 6 : 6_SUB	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>		100,00		1.475.000.000,00	<b>0,05</b>	7,50		114.446.000,00	6,30		46.168.000,00	83,99	40,34	6,86		51.508.000,00	6,86	3,49
2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	100,00		1.375.000.000,00	<b>0,93</b>	6,25		90.766.000,00	4,96		30.688.000,00	79,36	30,20	5,41		30.688.000,00	<b>5,41</b>	2,23
2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)	100,00	6	1.150.000.000,00	<b>0,84</b>	0,00	0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Penyaluran Cadangan Pangan	100,00	5	1.132.694.000,00	0,98	0,00	0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Rapat Evaluasi Penyaluran Cadangan Pangan Untuk Daerah Rawan Pangan	100,00	1	17.306.000,00	0,02	0,00	0	0,00		0	0,00		NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.09.04.1.02.0003 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Satuan: Dokumen)	100,00	1	50.000.000,00	<b>0,04</b>	0,00	0	0,00		0	0,00		NaN	1,80	0	900.000,00	1,80	1,80
	Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	100,00	1	50.000.000,00	1,00	0,00	0	0,00		0	0,00		NaN	1,80	0	900.000,00	1,80	1,80
2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Satuan: Dokumen)	100,00	1	100.000.000,00	<b>0,07</b>	57,46	0	57.366.000,00	57,46	0	300.000,00	100,01	0,52	60,83	0	2.680.000,00	60,83	2,68
	Pembinaan Daerah Rentan Rawan Pangan	100,00	1	62.897.680,00	0,63	91,20	0	57.366.000,00	91,21	0	300.000,00	100,01	0,52	95,13	0	1.780.000,00	95,13	2,83
	Gerakan Selamatkan Pangan	100,00	0	37.102.320,00	0,37	0,00	0	0,00		0	0,00		NaN	2,43	0	900.000,00	2,43	2,43
2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Satuan: Dokumen)	100,00	1	75.000.000,00	<b>0,05</b>	44,60	0	33.400.000,00	18,78	0	27.108.000,00	42,11	81,16	21,58	0	27.108.000,00	21,58	36,14
	Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	100,00	0	41.900.000,00	0,56	67,08	0	28.108.000,00	33,54	0	27.108.000,00	50,00	96,44	38,53	0	27.108.000,00	38,53	64,70
	Publikasi Hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	100,00	1	33.100.000,00	0,44	15,99	0	5.292.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

### Kendala dan Tindaklanjut

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi secara fisik kegiatan pembinaan daerah rentan rawan pangan telah dilaksanakan 3 kali kegiatan pada Bulan Juni (Pandeglang, Kab. Tangerang, dan Kab/Kota Serang (gabungan)) , namun secara realisasi anggaran dalam proses administrasi keuangan pada Bulan Juli 202
2. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi, telah dilaksanakan BinteK Penyusunan Peta SKPG, secara realisasi keuangan tidak ada kendala dan efisiensi terhadap Narasumber.

**V. Program Pengawasan Keamanan Pangan,** Outcome : Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (50%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dinas) realisasi **Rp. 64.702.000,- (19,61 %)** dari pagu sebesar **Rp. 330.000.000** dan **capaian fisik mencapai 58,92%** dengan sub kegiatan : Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi;

Tabel 5  
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	4	5	6	A = 6 : 6 SUB	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>		100,00		330.000.000,00	0,01	19,02		63.884.000,00	17,28		55.982.000,00	90,88	87,63	27,85		64.702.000,00	27,85	19,61
2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100,00		330.000.000,00	1,00	19,02		63.884.000,00	17,28		64.702.000,00	90,88	87,63	27,85		64.702.000,00	27,85	19,61
2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Satuan: Dokumen)	100,00	3	330.000.000,00	1,00	19,02	1	63.884.000,00	17,28	1	55.982.000,00	90,88	87,63	27,85	1	64.702.000,00	27,85	19,61
	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100,00	1	24.050.000,00	0,07	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		NaN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Pembinaan Pelaku Usaha PSAT di Peredaran	100,00	1	24.050.000,00	0,07	95,38	1	22.940.000,00	91,43	1	18.840.000,00	95,86	82,13	96,05	1	18.840.000,00	96,05	78,34
	Pengawasan dan Pemantauan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Peredaran	100,00	1	281.900.000,00	0,85	14,52	0	40.944.000,00	12,80	0	37.142.000,00	88,19	90,71	24,86	0	45.862.000,00	24,86	16,27

**Kendala dan Tindak lanjut**

Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi hasil pengawasan keamanan pangan PSAT belum dilaksanakan, masuk pada rencana kerja target capaian Triwulan III, dan Pembinaan pelaku usaha PSAT diperedaran sisa realisasi masih dalam proses keuangan, Pengadaan Rapat Test Kit belum dilaksanakan karena spesifikasi barang tidak ada dalam e katalog, tindak lanjut akan dilaksanakan di perubahan anggaran.

2. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD) realisasi **Rp. 55.058.300,- (27,53%)** dari pagu sebesar **Rp. 200.000.000** dan **capaian fisik mencapai 32,06%** dengan sub kegiatan :

a) Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal

Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;

b) Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

Tabel 5  
Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Target Tahunan			Prosen tase Anggaran	Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan	
		(%)	Output	Anggaran (Rp)		(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>		100,00		200.000.000,00	0,46	29,16		58.472.800,00	19,57		28.458.003,00	67,10	48,67	31,25		35.018.003,00	31,25	17,51
2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100,00		200.000.000,00	1,00	29,16		58.472.800,00	19,57		35.018.003,00	67,10	48,67	31,25		35.018.003,00	31,25	17,51
2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Satuan: Sertifikat)	100,00	15	100.000.000,00	0,50	34,74	3	35.002.000,00	34,74	3	28.458.000,00	100,00	81,30	41,32	5	35.018.000,00	41,32	35,02
	Sosialisasi Izin Jaminan Mutu Hidroponik, Prima 2 dan 3	100,00	0	11.364.000,00	0,11	100,00	0	11.364.000,00	100,00	0	10.364.000,00	100,00	91,20	100,00	0	10.364.000,00	100,00	91,20
	Rapat Tim Otonias Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Banten	100,00	15	47.814.000,00	0,48	33,17	3	15.858.000,00	33,17	3	14.094.000,00	100,00	88,88	36,86	5	15.858.000,00	36,86	33,17
	Audit/penilaian lapang sertifikat penerapan penanganan yang baik (SPPB) PSAT dan Penyebarluasan data dan informasi sertifikasi PSAT	100,00	0	40.822.000,00	0,41	19,06	0	7.780.000,00	19,06	0	4.000.000,00	100,00	51,41	30,81	0	8.796.000,00	30,81	21,55
2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Satuan: Dokumen)	100,00	30	50.000.000,00	0,25	1,54	3	768.000,00	1,54	3	3,00	100,00	0,00	9,54	17	3,00	9,54	0,00
	Monitoring Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	100,00	14	3.936.000,00	0,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		NaN	100,00	14	0,00	100,00	0,00
	Bimbingan Pemohonan Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100,00	16	46.064.000,00	0,92	1,67	3	768.000,00	1,67	3	3,00	100,00	0,00	1,67	3	3,00	1,67	0,00
2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Satuan: Dokumen)	100,00	15	50.000.000,00	0,25	45,63	6	22.702.800,00	7,26	3	0,00	15,91	0,00	32,82	5	0,00	32,82	0,00
	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	100,00	14	36.648.000,00	0,73	25,52	5	9.350.800,00	9,94	3	0,00	38,97	0,00	44,96	5	0,00	44,96	0,00
	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100,00	1	13.352.000,00	0,27	100,00	1	13.352.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Kendala dan Tindak lanjut

Tidak ada kendala namun realisasi terhadap target anggaran masih dalam proses keuangan.

## B. Capaian Realisasi Anggaran dan Fisik

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)		Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
					Tertimbang Kegiatan	Tertimbang Instansi	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(11) /(6)x100	(13)	(14)=(6-11)
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>30.691.088.026,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58,36</b>	<b>47,77</b>	<b>22,82</b>	<b>9.963.701.168,00</b>	<b>32,46</b>	<b>20.727.386.858,00</b>	<b>67,54</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>23.177.084.026,00</b>	<b>75,52</b>	<b>53,17</b>	<b>27,95</b>	<b>13,35</b>	<b>9.147.940.868,00</b>	<b>39,47</b>	<b>14.029.143.158,00</b>	<b>60,53</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000,00	0,85	22,71	43,08	20,58	77.812.000,00	29,93	182.188.000,00	70,07
	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.000.000,00	0,18	60,48	71,43	34,12	43.852.000,00	60,07	29.148.000,00	39,93
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000,00	0,04	0,00	-	-	-	-	12.000.000,00	100,00
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000,00	0,04	0,00	-	-	-	-	12.000.000,00	100,00
	d Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	0,03	0,00	-	-	-	-	10.000.000,00	100,00
	e Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000,00	0,03	0,00	-	-	-	-	10.000.000,00	100,00
	f Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.000.000,00	0,28	47,95	12,80	6,11	15.720.000,00	18,49	69.280.000,00	81,51
	g Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.000.000,00	0,19	50,55	45,00	21,50	18.240.000,00	31,45	39.760.000,00	68,55
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.303.425.726,00	62,90	33,65	40,56	19,38	7.639.953.977,00	39,58	11.663.471.749,00	60,42
	a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.862.925.726,00	61,46	49,08	42,90	20,49	7.491.415.977,00	39,72	11.371.509.749,00	60,28
	b Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	390.000.000,00	1,27	41,67	29,17	13,93	134.250.000,00	34,42	255.750.000,00	65,58
	c Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.500.000,00	0,05	63,38	66,67	31,85	7.312.000,00	47,17	8.188.000,00	52,83
	d Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000,00	0,01	0,00	-	-	-	-	3.500.000,00	100,00
	e Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.500.000,00	0,01	0,00	-	-	-	-	3.500.000,00	100,00
	f Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.000.000,00	0,09	47,76	23,50	11,23	6.976.000,00	24,91	21.024.000,00	75,09
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.878.500,00	0,24	69,40	2,78	1,33	900.000,00	1,20	73.978.500,00	98,80
	a Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.878.500,00	0,24	69,40	2,78	1,33	900.000,00	1,20	73.978.500,00	98,80
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	863.973.800,00	2,82	59,56	44,44	21,23	369.227.197,00	42,74	494.746.603,00	57,26
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.705.000,00	0,04	59,02	25,00	11,94	7.225.000,00	56,87	5.480.000,00	43,13
	b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.914.000,00	0,42	83,71	50,00	23,89	104.827.150,00	81,95	23.086.850,00	18,05
	c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000,00	0,98	57,94	50,00	23,89	146.152.000,00	48,72	153.848.000,00	51,28
	d Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.500.000,00	0,20	66,26	75,00	35,83	36.250.000,00	59,92	24.250.000,00	40,08
	e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	0,05	50,00	50,00	23,89	6.625.000,00	44,17	8.375.000,00	55,83
	f Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	0,07	0,00	-	-	-	-	20.000.000,00	100,00
	g Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.854.800,00	1,05	60,25	11,11	5,31	61.441.047,00	19,15	259.413.753,00	80,85
	h Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000,00	0,02	99,30	50,00	23,89	6.707.000,00	95,81	293.000,00	4,19
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.963.630.000,00	6,40	64,23	42,40	20,26	744.393.817,00	37,91	1.219.236.183,00	62,09
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.630.000,00	0,01	100,00	50,00	23,89	3.108.000,00	85,62	522.000,00	14,38
	b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000,00	2,12	42,00	30,00	14,33	101.938.341,00	15,68	548.061.659,00	84,32
	c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.310.000.000,00	4,27	50,70	47,20	22,55	639.347.476,00	48,81	670.652.524,00	51,19
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.466.000,00	1,55	68,52	25,20	12,04	257.955.600,00	54,25	217.510.400,00	45,75
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	311.662.000,00	1,02	50,02	4,17	1,99	132.903.100,00	42,64	178.758.900,00	57,36
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.855.000,00	0,25	55,64	21,43	10,24	38.613.000,00	50,24	38.242.000,00	49,76
	c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.949.000,00	0,28	99,90	50,00	23,89	86.439.500,00	99,41	509.500,00	0,59
7	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	164.150.000,00	0,53	70,00	28,61	13,67	49.839.377,00	30,36	114.310.623,00	69,64
	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	0,02	99,04	50,00	23,89	4.827.000,00	96,54	173.000,00	3,46
	b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000,00	0,10	100,00	33,33	15,92	14.681.637,00	47,36	16.318.363,00	52,64
	c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.000.000,00	0,12	63,11	20,42	9,76	16.958.480,00	44,63	21.041.520,00	55,37
	d Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.150.000,00	0,06	72,90	10,94	5,22	2.929.760,00	16,14	15.220.240,00	83,86
	e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.630.000,00	0,01	47,96	11,00	5,25	596.500,00	16,43	3.033.500,00	83,57
	f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.370.000,00	0,22	36,97	46,00	21,98	9.846.000,00	14,40	58.524.000,00	85,60
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	3.630.000,00	0,01	51,68	11,50	5,49	840.000,00	23,14	2.790.000,00	76,86
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.630.000,00	0,01	51,68	11,50	5,49	840.000,00	23,14	2.790.000,00	76,86
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	67.930.000,00	0,22	38,79	13,00	6,21	7.018.900,00	10,33	60.911.100,00	89,67
	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.930.000,00	0,13	44,44	13,00	6,21	7.018.900,00	17,58	32.911.100,00	82,42
	b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000,00	0,09	33,15	-	-	-	-	28.000.000,00	100,00

No.	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)		Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
					Tertimbang Kegiatan	Tertimbang Instansi	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(11) :(6)x100	(13)	(14)=(6-11)
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>30.691.088.026,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58,36</b>	<b>47,77</b>	<b>22,82</b>	<b>9.963.701.168,00</b>	<b>32,46</b>	<b>20.727.386.858,00</b>	<b>67,54</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLA SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,16</b>	<b>95,04</b>	<b>92,00</b>	<b>43,95</b>	<b>8.380.000,00</b>	<b>16,76</b>	<b>41.620.000,00</b>	<b>83,24</b>
10	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000,00	0,16	95,04	92,00	43,95	8.380.000,00	16,76	41.620.000,00	83,24
	a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	50.000.000,00	0,16	95,04	92,00	43,95	8.380.000,00	16,76	41.620.000,00	83,24
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>5.459.004.000,00</b>	<b>17,79</b>	<b>54,10</b>	<b>49,25</b>	<b>-</b>	<b>634.212.000,00</b>	<b>11,62</b>	<b>4.824.792.000,00</b>	<b>88,38</b>
11	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.233.918.000,00	4,02	55,12	42,21	20,16	163.434.000,00	13,25	1.070.484.000,00	86,75
	a Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	50.000.000,00	0,16	94,80	33,33	15,92	16.620.000,00	33,24	33.380.000,00	66,76
	b Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	616.726.000,00	2,01	58,52	49,76	23,77	112.554.000,00	18,25	504.172.000,00	81,75
	c Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	75.000.000,00	0,24	4,80	-	-	-	-	75.000.000,00	100,00
	d Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	100.000.000,00	0,33	53,69	55,00	26,27	19.910.000,00	19,91	80.090.000,00	80,09
	e Sub Kegiatan Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	92.192.000,00	0,30	63,59	20,00	9,55	14.350.000,00	15,57	77.842.000,00	84,43
	f Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	300.000.000,00	0,98	55,31	10,74	5,13	-	-	300.000.000,00	100,00
12	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.950.086.000,00	9,61	59,58	49,31	23,55	26.790.000,00	0,91	2.923.296.000,00	99,09
	a Sub Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	300.000.000,00	0,98	99,97	25,00	11,94	-	-	300.000.000,00	100,00
	b Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2.583.000.000,00	8,42	0,66	-	-	-	-	2.583.000.000,00	100,00
	c Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	67.086.000,00	0,22	78,10	73,61	35,17	26.790.000,00	39,93	40.296.000,00	60,07
13	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.275.000.000,00	4,15	47,60	56,25	26,87	443.988.000,00	34,82	831.012.000,00	65,18
	a Sub Kegiatan Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	600.000.000,00	1,95	58,65	37,92	18,11	268.477.000,00	44,75	331.523.000,00	55,25
	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	600.000.000,00	1,95	73,70	18,33	8,76	175.511.000,00	29,25	424.489.000,00	70,75
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	75.000.000,00	0,24	10,43	-	-	-	-	75.000.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>1.475.000.000,00</b>	<b>4,81</b>	<b>31,18</b>	<b>24,17</b>	<b>11,55</b>	<b>53.408.000,00</b>	<b>3,62</b>	<b>1.421.592.000,00</b>	<b>96,38</b>
14	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	100.000.000,00	0,33	25,74	32,38	15,47	21.140.000,00	21,14	78.860.000,00	78,86
	a Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,33	25,74	32,38	15,47	21.140.000,00	21,14	78.860.000,00	78,86
15	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	1.375.000.000,00	4,48	36,62	15,95	7,62	32.268.000,00	2,35	1.342.732.000,00	97,65
	a Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.150.000.000,00	3,75	0,00	-	-	-	-	1.150.000.000,00	100,00
	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	50.000.000,00	0,16	1,80	1,67	0,80	900.000,00	1,80	49.100.000,00	98,20
	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	100.000.000,00	0,33	60,73	4,77	2,28	2.380.000,00	2,38	97.620.000,00	97,62
	d Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	75.000.000,00	0,24	47,32	41,43	19,79	28.988.000,00	38,65	46.012.000,00	61,35
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>530.000.000,00</b>	<b>1,73</b>	<b>58,31</b>	<b>45,49</b>	<b>21,73</b>	<b>119.760.300,00</b>	<b>22,60</b>	<b>410.239.700,00</b>	<b>77,40</b>
16	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000,00	1,08	75,20	58,92	28,15	64.702.000,00	19,61	265.298.000,00	80,39
	a Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	330.000.000,00	1,08	75,20	58,92	28,15	64.702.000,00	19,61	265.298.000,00	80,39
17	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	200.000.000,00	0,65	41,43	32,06	15,31	55.058.300,00	27,53	144.941.700,00	72,47
	a Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100.000.000,00	0,33	41,56	56,50	26,99	35.018.000,00	35,02	64.982.000,00	64,98
	b Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	50.000.000,00	0,16	9,41	12,67	6,05	3.827.000,00	7,65	46.173.000,00	92,35
	c Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah	50.000.000,00	0,16	73,31	27,00	12,90	16.213.300,00	32,43	33.786.700,00	67,57
<b>J U M L A H</b>		<b>30.691.088.026,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58,36</b>	<b>47,77</b>	<b>22,82</b>	<b>9.963.701.168,00</b>	<b>32,46</b>	<b>20.727.386.858,00</b>	<b>67,54</b>

### C. Pelaksanaan Rencana Aksi

Pelaksanaan rencana aksi sebagai analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian triwulan II kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang sudah dilaksanakan.

#### I. Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadilan dan Kemandirian Pangan

- a. Sosialisasi Kajian Peta Jalan Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024
  - Buku Kajian Peta Jalan Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan Tahun 2023 telah didistribusikan ke Kabupaten/Kota , Organisasi Perangkat Daerah terkait lingkup Provinsi Banten dan Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
  - Kajian tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur kebutuhan infrastruktur yang bertujuan mendukung kemandirian pangan.
  - Dapat mengidentifikasi ketersediaan dan kondisi infrastruktur pendukung kemandirian pangan.
  - Mendorong diskursus dilingkup perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan perihal konsep, arah, pendekatan, strategi, dan peta jalan Pembangunan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.
  - Menindaklanjuti program kegiatan penyediaan infrastruktur yang bersumber dari Dana APBD Dinas Ketahanan Provinsi Banten terhadap Masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota.



- b. Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Penyusunan Kajian Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan, pada tanggal 20 Juni 2024
  - Mengkompilasi data Calon Penerima dan Penerima Infrastruktur Kemandirian pangan dari Kabupaten/Kota dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Data tersebut menjadi Data Base bagi tingkat Provinsi Banten sebagai acuan, sehingga diharapkan

tidak akan terjadi duplikasi data penerima bantuan.

- Membuat skala prioritas jenis bantuan infrastruktur yang dibutuhkan sebagai rekomendasi dalam rencana kerja pelaksanaan kegiatan Anggaran tahun 2026 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten melalui Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi berdasarkan Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.
- Menginformasikan mekanisme pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur melalui Website <http://ehibahbansos.bantenprov.go.id>



## II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
  - a. Pelaksanaan Gelar Pangan Murah
    - Gerai Pangan Murah beroperasi selama 5 hari kerja (senin s/d Jum'at) dari pukul 7.30 – 16.00 WIB. Omset yang diperoleh GPM berasal dari penjualan yang dilakukan di Toko dan di luar Toko, seperti di acara Bazar. Setiap hari Selasa dan Jum'at pagi, GPM berpartisipasi pada Pasar Tani di Danau I KP3B Banten. Sedangkan pada hari Rabu GPM berkolaborasi dengan POLDA Banten mengadakan Bazar Ramadhan di BIDDOKES POLDA Banten, Alun-alun Serang. Pada kegiatan Bazar ini GPM cukup diminati oleh para konsumen karena menawarkan komoditi pangan dengan harga yang murah dan terjangkau oleh Masyarakat

- GPM 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024 telah dilaksanakan sebanyak 65 kali dengan sebaran lokasi sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	JUMLAH GPM
1	Kota Serang	53
2	Kab. Serang	
3	Kab. Pandeglang	4
4	Kab. Tangerang	2
5	Kota Tangerang Selatan	-
6	Kota Tangerang	1
7	Kota Cilegon	2
8	Kab. Lebak	3
Jumlah		65

GPM bertempat di Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Gelar Pangan Murah kolaborasi dengan Disperindag, Kota Cilegon. Tanggal 12 Juni 2024



- Pelaksanaan Rakor Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Poktan/Gapoktan yang dilaksanakan pada pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2024 dalam rangka penguatan pengelolaan GPM Banten dan gerai pangan murah. Dimana GPM Banten merupakan salah satu sarana bagi para LDPM di dalam memasarkan dan memperkenalkan panganan lokal dan komoditi bahan pokok secara murah, terjangkau dan efisien dengan memangkas jalur distribusi pangan untuk konsumen sehingga menciptakan suatu kestabilan baik dari harga maupun stok barang di pasar.

**Ada 44 lembaga yang menjadi binaan Provinsi Banten :**

Pada Triwulan II yang telah dilaksanakan yakni Bintek Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Poktan/Gapoktan yang dilaksanakan pada pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dengan Pembinaan poktan dan gapotan

- Pendampingan dalam menjawab tantangan perubahan jaman. Pembinaan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan poktan menjadi lebih tangguh, kuat dan mandiri.
- Mendorong lembaga binaan legalitas ber badan hukum, dengan jenis Perusahaan Perseorangan, Perseroan Comanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Badan Hukum Koperasi dan Mutual (Badan Hukum Usaha Bersama).



c. Pelaksanaan pemantauan atas ketersediaan stabilitas harga, Pada Bulan Juli 2024 minggu kedua untuk ketersediaan Pasokan 12 (dua belas) Komoditas pangan dapat di lihat pada table berikut :

	KOMODITAS PANGAN STRATEGIS	JULI			SURPLUS/DEFISIT
		PROYEKSI KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	NERACA	
1	Beras	295.826	106.068	189.758	SURPLUS
2	Jagung	12.646	8.407	4.239	SURPLUS
3	Kedelai	14.000	8.335	5.665	SURPLUS
4	Bawang Merah	3.453	2.987	466	SURPLUS
5	Bawang Putih	3.403	1.997	1.406	SURPLUS
6	Cabai Besar	5.378	5.255	123	SURPLUS
7	Cabai Rawit	4.221	3.979	242	SURPLUS
8	Daging Sapi/Kerbau	5.684	3.418	2.265	SURPLUS
9	Daging Ayam Ras	18.434	16.359	2.075	SURPLUS
10	Telur Ayam Ras	18.983	16.823	2.159	SURPLUS
11	Gula Pasir	10.597	3.818	6.779	SURPLUS
12	Minyak Goreng	13.087	10.874	2.213	SURPLUS

## Dengan trend Harga Komoditas

### TREND HARGA KOMODITAS PANGAN sd. 11 July 2024

NO.	KOMODITAS	HAP-HET (Rp/Kg)		TERHADAP HARI SEBELUMNYA				TERHADAP RERATA MINGGU LALU				TERHADAP RERATA BULAN LALU				TERHADAP RERATA TAHUN LALU				KAB/KOTA	HARGA TERENDAH HARI INI Rp/Kg	KAB/KOTA
				11-Jul		10-Jul		Jul-2		Jul-1		Juni		Mei		2023		2022				
				Rp/Kg	%	Rp/Kg	%	Rp/Kg	%	Rp/Kg	%	Rp/Kg	%	Rp/Kg	%	Rp/Kg	%	Rp/Kg	%			
1	Beras Premium	12.800	13.900	14.688	-	14.688	14.641	(0,11)	14.656	14.491	0,41	14.432	12.443	9,18	11.301	13.500	Kab. Tangerang	16.000	Kab. Pandeglang			
2	Beras Medium	9.450	10.900	12.875	0,49	12.813	12.727	0,31	12.688	12.380	(0,25)	12.411	11.217	11,16	9.965	11.000	Kab. Pandeglang	14.500	Kota Tangerang Selatan			
3	Kedelai Biji Kering (Impor)	12.000	12.000	13.000	1,28	12.833	12.887	1,93	12.638	12.866	(4,12)	13.397	15.089	11,94	13.287	11.000	Kota Serang	16.000	Kab. Tangerang			
4	Bawang Merah	36.500	41.500	28.500	(2,19)	29.125	31.141	(6,37)	33.125	41.018	(20,69)	49.505	36.770	9,20	33.388	25.000	Kota Tangerang Selatan	31.000	Kab. Lebak			
5	Bawang Putih Bonggol	32.000	31.500	38.500	(1,95)	39.250	39.172	(1,91)	39.922	40.004	(1,43)	40.576	30.051	5,60	28.369	33.000	Kota Tangerang Selatan	40.000	Kota Serang			
6	Cabai Merah Keriting	37.000	55.000	42.000	0,89	41.625	41.297	6,96	38.422	50.249	2,54	48.973	42.792	5,05	40.629	35.000	Kota Serang	50.000	Kota Tangerang Selatan			
7	Cabai Rawit Merah	40.000	57.000	49.125	4,32	47.001	44.547	13,26	38.641	39.610	5,83	37.301	60.745	18,22	49.679	38.000	Kab. Lebak	60.000	Kota Cilegon			
8	Daging Sapi Murni	140.000	140.000	136.250	0,92	135.001	135.157	0,17	134.922	136.208	0,65	135.326	138.191	1,84	135.654	130.000	Kota Cilegon	150.000	Kab. Lebak			
9	Daging Ayam Ras	36.750	36.750	38.125	-	38.125	37.547	0,46	37.375	38.142	1,29	37.649	36.108	(5,15)	37.968	35.000	Kab. Lebak	40.000	Kab. Tangerang			
10	Telur Ayam Ras	27.000	27.000	27.625	-	27.625	27.977	(2,09)	28.563	28.381	(2,88)	29.199	27.833	14,20	23.881	26.500	Kab. Lebak	29.000	Kab. Tangerang			
11	Gula Pasir Konsumsi	13.500	13.500	17.625	0,35	17.563	17.336	(0,45)	17.414	17.746	(1,30)	17.977	14.205	3,43	13.718	17.000	Kota Tangerang Selatan	18.000	Kota Serang			
12	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	14.000	14.000	16.625	-	16.625	16.656	(1,41)	16.891	16.623	(0,53)	16.711	15.817	(25,11)	19.788	14.500	Kota Tangerang Selatan	18.000	Kab. Tangerang			
13	Tepung Terigu (Curah)	9.500	10.500	10.143	-	10.143	10.239	(0,26)	10.266	10.119	(0,50)	10.170	10.266	7,38	9.509	9.000	Kota Cilegon	11.000	Kota Serang			
14	Minyak Goreng Curah	14.000	25.000	15.063	-	15.063	15.195	0,36	15.141	14.783	(0,26)	14.821	14.022	68,19	4.461	13.000	Kab. Pandeglang	17.000	Kota Tangerang			
15	Jagung Tk Peternak	5.000	9.000	7.500	-	7.500	7.500	-	7.500	7.500	9,35	6.799	6.801	100,00	-	7.000	Kab. Lebak	8.000	Kota Cilegon			
16	Ikan Kembung	-	-	36.250	(0,69)	36.500	36.672	(0,68)	36.922	36.604	1,14	36.186	40.398	100,00	-	30.000	Kab. Serang	50.000	Kab. Tangerang			
17	Ikan Tongkol	-	-	34.125	(0,00)	34.126	34.078	0,51	33.906	34.130	0,89	33.828	34.980	100,00	-	30.000	Kota Serang	50.000	Kab. Tangerang			
18	Ikan Bandeng	-	-	32.500	-	32.500	32.328	0,53	32.156	32.598	(1,75)	33.167	36.382	100,00	-	25.000	Kab. Pandeglang	40.000	Kab. Tangerang			
19	Garam Halus Beryodium	1.000	10.000	11.313	-	11.313	11.060	(2,35)	11.320	11.052	(0,81)	11.141	10.889	100,00	-	10.000	Kab. Serang	14.500	Kota Tangerang Selatan			
20	Tepung Terigu Kemasan (Non Curah)	-	-	12.313	-	12.313	12.328	(0,36)	12.373	12.276	0,49	12.216	11.994	100,00	-	12.000	Kab. Serang	13.000	Kota Cilegon			

Note

Pemantauan Baru

Hasil survey pemantauan atas ketersediaan Pada Hari Kamis Minggu Kedua Bulan Juli, dari 20 komoditas apabila melihat rata-rata minggu lalu terdapat 9 komoditas yang mengalami kenaikan harga dibanding hargapada minggu lalu yaitu 1. Beras Medium, 2, Kedelai Biji Kering (Impor), 3. Cabai Merah Keriting, 4. Cabai Rawit Merah, 5. Daging Sapi Murni, 6. Daging Ayam Ras, 7. Minyak Goreng Curah, 8. Ikan Tongkol, 9. Ikan Bandeng. Kenaikan paling tinggi adalah di komoditas Cabai Rawit Merah 13,22% (harga sebelumnya Rp. 38.641 menjadi Rp. 41.297) Harga tertinggi berada di Kota Cilegon dan terendah di Kabupaten Lebak. Sementara untuk harga yang turun (penurunan harga) ada 10 komoditas yaitu: 1. Beras Premium, 2. Bawang Merah, 3. Bawang Putih Bonggol, 4. Telur Ayam Ras, 5. Gula Pasir Konsumsi, 6. Minyak Goreng Kemasan Sederhana, 7. Tepung Terigu (Curah), 8. Ikan Kembung, 9. Garam Halus Beryodium, 10. Tepung Terigu Kemasan. Penurunan Harga yang paling rendah adalah komoditas Bawang Merah sebesar 6,37% (harga sebelumnya adalah Rp. 33.125 menjadi Rp.31.141 dengan harga terendah di Kota Tangerang Selatan dan Harga tertinggi di Kota Serang. Untuk Komoditas Jagung Tk Peternak minggu ini mengalami harga yang stabil dibanding dengan minggu lalu.



FGD Satgas Ketahanan pangan Rapat Kegiatan FGD Satgas Ketahanan Pangan di Pasar Rau Pada tanggal 13 Maret Satuan Tugas Ketahanan Pangan mempunyai tugas: a. Melakukan pemantauan harga terhadap harga pangan; b. Melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pangan; c. Melakukan pemantauan terhadap keamanan pangan; d. Memastikan dan melakukan pengawasan/ monitoring terhadap ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 13 (tiga belas) bahan pangan strategis di Provinsi Banten; dan e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Satgas pangan daerah perlu mengoptimalkan pemantauan atas ketersediaan stabilitas harga, serta kelancaran distribusi pangan dan mengantisipasi gejolak harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen dan mempertimbangkan jika perlu ada intervensi operasi pasar khususnya pada Bulan Ramadhan, Natal dan Tahun Baru.

- d. Rapat Koordinasi dengan petugas Enumerator Kab/Kota Panel Harga Pangan dalam menginput data dan informasi harga pangan tingkat produsen dan tingkat konsumen pada level nasional, provinsi, dan Kab Kota. Komoditas Panel harga enumerator produsen: Gabah kering panen, Gabah Kering Giling, Beras Medium, Beras Premium, Jagung Piliran Kering, Biji Kedelai Kering, Cabai Rawit Merah, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Sapi Hidup, Ayam Hidup, Telur. panel harga pangan menjadi rujukan data awal laporan inflasi daerah. Inflasi menggambarkan perubahan harga bukan tinggi tingkat harga. Enumerator diharapkan dapat menganalisa apabila terjadi penurunan atau kenaikan harga yang signifikan. Salah satu untuk mempertahankan inflasi adalah dengan pemastian ketersediaan

pangan dimana harus dipastikan ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga pangan. Dimana semua opd atau instansi terkait berperan serta. Selain dari pemantauan harga yaitu dengan pelaksanaan GPM

- e. Rapat penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dengan peserta adalah Dinas yang membawahi ketahanan pangan di 8 Kab Kota, Narasumber dari Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Bapanas RI. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi penyusunan yang dilakukan oleh tim NBM Pusat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Aplikasi ini digunakan untuk menganalisis ketersediaan pangan wilayah, mengevaluasi program ketahanan pangan terkait aspek ketersediaan yang telah dilaksanakan. Analisis dilakukan secara deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Tahapan awal pengolahan data ketersediaan pangan adalah rekap data pokok berupa data jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, data pengadaan atau penyediaan pangan (produksi, impor, ekspor, dan perubahan stok), data penggunaan pangan dan faktor konversi pangan. Pada kajian ini dilakukan estimasi impor dan ekspor pangan. Estimasi jumlah impor ekspor pangan diperoleh dari selisih antara data konsumsi pangan dengan data produksi pangan. Data konsumsi pangan yang digunakan adalah jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi penduduk Provinsi Banten dalam satuan (kg/kapita/minggu) pada data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Data konsumsi tersebut dikonversi sebesar 110% untuk diperoleh jumlah ketersediaan pangan penduduk. Jika selisih antara pangan yang dikonsumsi dan diproduksi bernilai positif maka pangan tersebut berasal dari impor dari wilayah lain. Namun, jika selisihnya bernilai negatif maka ini menunjukkan bahwa nilai produksi lebih besar dibandingkan dengan konsumsi. Hal ini dapat diestimasi sebagai ekspor. Jika tidak tersedia data produksi pangan, maka jumlah konsumsi pangan tersebut merupakan satu-satunya sumber pengadaan pangan yang berasal dari impor. Tahap berikutnya yaitu proses entry data yang terkumpul ke dalam aplikasi. Setelah itu, dapat dilakukan proses analisis ketersediaan pangan, yaitu Analisis situasi ketersediaan pangan (angka kecukupan energi, angka kecukupan protein, dan

skor PPH) tahun 2023 serta tingkat pencapaiannya terhadap standar ideal.

## 2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan

Cadangan Pangan Provinsi Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam

- a. Pemenuhan cadangan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah. Bahkan Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pangan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta terdapat pembagian urusan yang jelas antara Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kab/Kota terkait penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan (cadangan pangan), dan penanganan kerawanan pangan. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengamanatkan perlunya Cadangan Pangan Nasional yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota, Desa). Oleh karenanya, upaya penguatan cadangan pangan nasional harus berjalan selaras dan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penentuan cadangan pangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota diestimasi menggunakan rumusan tertentu berdasarkan wilayah dan memperhatikan jenis pangan pokok tertentu disuatu wilayah, jumlah penduduk wilayah dan kemampuan APBD wilayah tersebut, dengan menggunakan perhitungan berdasarkan tata cara perhitungan sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 Tahun 2023.
- c. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten memiliki *iron stok* CPP sebesar 977.756,40 Kg beras yang disimpan dalam gudang Bulog.
- d. Delapan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten telah memiliki CPP dan 5 diantaranya akan melaksanakan pengadaan CPP pada tahun 2024 yakni Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, Kabupaten

Tangerang, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang Selatan ,  
Dinas Ketahanan Kota Tangerang dan DKPP Kota Cilegon

- e. Kabupaten/Kota khususnya admin telah dapat mengisi data bulanan CPP dan CPM tiap bulannya di Aplikasi Updating Sistem Informasi Cadangan Pangan (SiCDP) yang sudah disediakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dan website Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional (SIGAPNAS)
- f. Gubernur menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi mempertimbangkan:
  - produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah provinsi;
  - kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan kerawanan Pangan.Dan disesuaikan dengan:
  - kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - potensi sumber daya desa.
- g. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah oleh Bapanas melalui Pemberian Bantuan Pangan dilakukan 2 tahap yakni Tahap 1 Januari-Maret 2024 dan Tahap 2 April- Juni 2024 dengan sasaran Masyarakat Miskin dan yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.
- h. CPP juga ditujukan untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat dengan jenis bencana: Bencana Alam ( Gempa bumi, tsunami Banjir, Angin topan dll) Bencana Non Alam (Gagal Teknologi, gagal Modern, Epidemii dan wabah penyakit) dan Bencana Sosial ( konflik sosial antar kelompok atau antar komunikasi masyarakat dan Teror)
- i. Dalam memperkuat ketahanan pangan Nasional juga diperlukan adanya penguatan peran Perum BULOG sebagai BUMN yang memperoleh status *State Trading Enterprise/Parastatal* (Agensi Perdagangan Pemerintah) menurut Pasal XVII-WTO dan berperan strategis dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peningkatan kualitas pengelolaan cadangan pangan oleh Perum BULOG perlu dilakukan dengan terus berbenah diri dalam hal penyerapan komoditas pangan, peningkatan manajemen gudang, sistem perawatan komoditas dan SDM, perluasan infrastruktur gudang, distribusi, dan pengelolaan

system informasi yang terintegrasi.

Pihak PT. ABM sebagai BUMD Provinsi Banten juga diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan sektor ketahanan pangan khususnya dalam penguatan Cadangan Pangan

- Buffer Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Banten pada akhir Tahun 2023 sebesar 1.053.079,85 Kg atau kurang lebih 1.053 ton.
- Diawal Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan Penyaluran sebanyak 2 Kali pada Januari sebanyak 45.000 Kg atau 45 ton di Kabupaten Serang dan pada bulan Maret sebanyak 30 Ton di Kabupaten Serang dan Kota Serang sehingga total penyaluran sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 75 ton beras CPP.
- Dengan Stok terakhir CPP per Bulan 30 Juni 2024 sebanyak 977.079,85 Kg atau kurang lebih 977 ton beras.



Dinas Ketahanan Pangan  
Provinsi Banten

#### REKAPITULASI DATA CPP PROVINSI BANTEN (BULOG)

PERIODE : 2 Mei 2024

73	31 Desember 2023	1.052.756,40	0,00	0,00	0,00	1.052.756,40	STOK AKHIR 2023 SESUAI DENGAN BERITA ACARA REKONSILIASI STOK BERAS CPP PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 ANTARA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN DENGAN KANWIL BULOG DKI JAKARTA-BANTEN
74	31 Januari 2024	1.052.756,40	0,00	45.000,00	0,00	1.007.756,40	Penyaluran CPP Ke Pesantren An-Nawawi Tanara sebanyak 5 Ton dan Penyaluran CPP ke Polda Banten 40 Ton
75	05 Maret 2024	1.007.756,40	0,00	30.000,00	0,00	977.756,40	Penyaluran kepada pondok pesantren melalui Kepolisian Daerah Banten.
<b>Total</b>		--	<b>2.584.639,00</b>	<b>1.493.808,60</b>	<b>113.074,00</b>	<b>977.756,40</b>	

	<b>PESANTREN (Kota Serang)</b>	<b>KPM</b>
1	Darusalam	15
2	Raoudotus Sibyan	30
3	Madnjul Ulum	70
4	Qodrun Nahwi	33
5	Al Munawar	50
6	Madrijul Ulum Arrohmah	60
7	Darul Rohmah	48
8	Al Hudri	30
9	Mirqotul Huda	60
10	Nurul Mustofa	15
11	Al Aziziyah	74
12	Darul Ibtida	27
13	Darul Fadol	30
14	Manbaul Ulum	40
15	Atthabraniyyah	48
16	Hidayatul Ulum	30
17	Ianatuth Tolibin	20
18	Bani Zein	48
19	Ziyadatul Ilmi	40
20	Nailul Amanah Umat	70
21	Al Mubarak	50
22	Bany Sofian	35
23	Tabriatulaulad	70
24	Hidayatul Mutaalimin	35
25	Bani Murod	20
26	Darunadwah	25
27	Darul Muftadi'in	41
28	Amalul Ummah	40
29	Raoudotus Sibyan	30
30	Sadana	20
31	Madarijul Ulum Ciomas	80
32	Daarul Qoriin	60
33	Kerese	50
34	Al Afif	50
35	Al Sakinah	30
36	Bani Qosim	30
37	Annur	40
38	Bani Al Katsir	30
39	Al Makhrus	40
40	Riyadul Awamil	45
41	Jaha Barus	10
42	Riyadul Awamil	15
43	Riyadul Awamil	15
44	Nurul Hidayah	30
45	Riyadul Falah	70
46	Jeungjing Padasuka	25
47	Nyodor Tengah	10
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1834</b>

<b>KABUPATEN SERANG</b>			
	<b>PESANTREN (Kabupaten Serang)</b>	<b>KPM</b>	
1	Riyadul Wildan	50	100
2	Hidayatul Muhtadiin	75	150
3	An Nawawi	70	140
4	Al Fasrie	54	108
5	Asshabul Maimanah	129	258
6	Daarul Fikri	37	74
7	Bani Soleh	35	70
8	Nurul Iman	22	44
9	Hidayatul Muhajirin	26	52
10	Darul Hijrah	30	60
11	Nurul Yakin	20	40
12	Nurul Yakin	20	40
13	Al Khafi	15	30
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>583</b>	<b>1166</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2417</b>	<b>3000</b>

## Rapat Penguatan Cadangan Pangan pada tanggal 29 April 2024



3. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Tahun Anggaran 2024 adalah :
    - Mendorong pembangunan ketahanan pangan yang mendukung pembangunan secara keseluruhan
    - Sinergitas program diversifikasi pangan dengan Badan/Dinas/Kantor Ketahanan Pangan baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota
    - Tersosialisasikannya Program Kegiatan Diversifikasi Pangan
    - Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku dalam mengkonsumsi pangan kearah yang semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya local
    - Mensosialisasikan diversifikasi konsumsi pangan berorientasi pada pola konsumsi yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup yang sesuai dengan kaidah hidup sehat
    - Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku dalam mengkonsumsi pangan kearah yang semakin beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya local
    - Meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
    - Mengembangkan pangan pokok sumber karbohidrat dengan berbagai bentuk olahannya yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, yang berbahan baku sumber pangan lokal;

- Membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan pokok selain beras serta sosialisasi dan promosi diversifikasi pangan.

1). Gerakan Sadar Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Daerah Stunting Provinsi Banten Tahun 2024.

- 20 Februari 2024 (Bapanas – Jakarta)
- 23 Februari 2024 (Kota Tangerang)
- 27 Februari 2024 (Kota Cilegon)
- 28 Februari 2024 (Kota Serang)
- 6 Maret 2024 (Kota Tangerang Selatan)
- 19 Maret 2024 (Kab.Lebak)
- 20 Maret 2024 (Kab.Tangerang)
- 26 Maret 2024 (Kab.Pandeglang)
- Melaksanakan Gerakan Sadar Konsumsi Pangan B2SA ke Aula Kantor Desa sodong Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang tanggal 12 Juni 2024
- Melaksanakan Gerakan Sadar Konsumsi Pangan B2SA ke Aula Kantor Kecamatan Labuan Kabuapten Pandeglang tanggal 13 Juni 2024
- Melaksanakan Gerakan Sadar Konsumsi Pangan B2SA ke Aula Kantor Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang tanggal 14 Juni 2024

2). Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Stunting dan Underweight

Kegiatan Pemberian makanan tambahan bagi anak stunting diberikan secara bertahap 3 kali pemberian dalam jangka waktu tertentu 1 – 3 minggu. Pemberian makanan tambahan yang diberikan adalah susu 1 liter dan telur 1 kg diberikan ke masing masing 2 penerima bantuan masing masing kabupaten kota 100 orang yang tersebar di 1 sampe 2 atau lebih penerima sasaran dan balita yang diberikan memiliki kriteria tertentu yaitu balita stunting dan underwiwght.

Program ini merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka membantu menurunkan angka stunting di 8 Kabupaten / kota  $\infty$  Tim sebelum melakukan penyaluran terlebih dahulu

melakukan koordinasi terhadap kegiatan ini yang selanjutnya dikirimkan data penerima penurunan angka stunting, selanjutnya dilakukan pengiriman bantuan makanan tambahan sesuai sasaran dari masing masing usulan Kabupaten/Kota.

Secara keseluruhan masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan berharap bantuan ini terus berlanjut.

Dokumentasi Penyaluran BMT bagi anak Stunting Kab/kota di  
Kec.Dringo Kota Cilegon



b. Pada Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

- Melalui pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Gerakan Menanam Pemanfaatan Lahan Pekarangan lahan tidur dan lahan kosong yang tidak
- produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menekan angka inflasi
- Pemberian Paket Percontohan benih tanaman dalam rangka Kegiatan Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan Goes To Ponpes dan dalam rangka menstabilkan inflasi dan mengurangi kemiskinan ektrim khususnya di wilayah stunting
- Agar kegiatan Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan ini berhasil, harus ada motivasi dari Pondok Pesantren dan dibantu oleh penyuluh pendamping kabupaten kota. serta harus memberikan sentuhan ekonomi atau nilai t

- Untuk pengelolaan pemanfaatan lahan pekarangan diharapkan menggunakan pupuk nabati yang ada di pekarangan anggota dan mulai menggunakan pupuk organik atau bisa mencampurkan antara pupuk organik dan pupuk anorganik
  - Dengan adanya Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan di Pondok Pesantren , diharapkan dapat meningkatkan perekonomian selain itu untuk pemanfaatan lahan pekarangan sebagai penyedia sumber pangan dan gizi rumah tangga.
  - Peserta secara keseluruhan sangat antusias terhadap pertemuan Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan dan menyambut positif terhadap kegiatan tersebut, para peserta akan segera mempraktekan materi yang telah di dapatkan dan akan segera diaplikasikan di lapangan sehingga terjadi peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan meningkatkan semangat bagi kelompok wanita tani agar tetap aktif dan produktif
  - Pondok Pesantren Penerima Bantuan Kegiatan P2L bisa ditujukan untuk pondok pesantren sesuai dengan ketentuan :
    - a. Pondok Pesantren sudah terdaftar di Kementerian Agama RI
    - b. Pondok Pesantren bersedia mengirimkan proposal dan profile pesantren
    - c. Pondok Pesantren Memiliki lahan minimal 500 meter ( lahan bisa di depan, samping dan belakang )
    - d. Pondok Pesantren Berbasis Salafi / Semi Modern
    - e. Pondok pesantren belum pernah mendapatkan bantuan yang sama sebelumnya
    - f. Pondok pesantren memiliki semangat dan motivasi untuk mendukung kegiatan P2L
    - g. Pondok Pesantren bersedia mengikuti sosialisasi dan arahan langsung dari penyuluh pendamping bidang Pertanian tentang teknik budidaya dan pemanfaatan lahan pekarangan
10. Adanya ketertarikan beberapa pondok pesantren dalam mengolah dan mempraktekan pupuk nabati dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan.
11. Akan dilakukan jadwal kegiatan dan rencana kegiatan monitoring terkait kegiatan ini
12. Ada beberapa peserta mengusulkan untuk adanya alat penunjang dalam prosen Pemanfaatan lahan pekarangan selain benih cabe dan benih sayuran diperlukan alat penunjang pertanian seperti cangkul dll.
13. Peserta mengungkapkan ucapan terima kasih atas diberikan nya bantuan ini dan dirasakan ada manfaatnya, bahkan di

sebagian pondok pesantren kegiatan proses menanam ini juga dijadikan pelajaran IPA terapan / pelajaran Mulok di pondok pesantren nya. 14.Beberapa peserta ada yang mengalami kendala dalam proses penanaman dan penyemaian tanaman, namun bisa dibantu oleh para penyuluh pendamping kecamatan yang ada di kabupaten / kota. 15.Program ini dirasakan sangat baik dan bermanfaat dan hasil bisa dirasakan oleh Pondok Pesantren,dalam kegiatan ini juga kegiatan nya melalui CPCL Pondok Pesantren yang ada di 8 Kabupaten / Kota. 16.Ada beberapa masukan dari kegiatan Gerakan Menanam dimana diantaranya kegiatan ini diperlukan peralatan lain untuk menunjang di lapangan seperti semprotan, mulsa, jaring dan lain lain, namun untuk peralatan tersebut di Dinas Ketahanan Pangan mengalami keterbatasan anggaran sehingga penyediaan alat tersebut bisa dialihkan atau dikoordinasikan ke Dinas lain seperti Dinas Pertanian Provinsi Banten

- Peserta secara keseluruhan sangat antusias terhadap pertemuan Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan dan menyambut positif terhadap kegiatan tersebut, para peserta akan segera mempraktekan materi yang telah di dapatkan dan akan segera diaplikasikan di lapangan sehingga terjadi peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan meningkatkan semangat bagi kelompok wanita tani agar tetap aktif dan produktif
- 18.Dalam keterbatasan lahan dan pengalaman kegiatan Pemanfaatan Lahan Goes to Ponpes bisa dirasakan manfaatnya dan bisa membantu kebutuhan pondok serta bisa dimasukkan ke dalam mulok walaupun menjadi pengalaman pertama dalam perawatannya namun tidak menjadi penghalang beberapa pondok untuk melakukan proses pemanfaatan tanaman.
- 19.Untuk jenis tanaman sayuran seperti sawi, tomat, kangkung dan jagung sudah mengalami beberapa panen dan sudah bisa dinikmati dan hasilnya ada beberapa yang dijual, sedangkan untuk tanaman cabe ada beberapa yang terkendala dalam hal perawatan dan adanya berbagai penyakit seperti hama, patek dan layu / busuk. 20.Diharapkan kegiatan ini masih terus berlangsung di tahun yang akan datang dengan sasaran yang bertambah jumlahnya dan diharapkan adanya perda

pemanfaatan lahan pekarangan khususnya di lingkungan Pondok Pesantren, sehingga bisa dijadikan ilmu baru di Pondok Pesantren

- Dalam teknik budidaya peserta diberikan pengetahuan tentang teknik menanam, memupuk, memasang ajir, memasang mulsa, pembenihan dan penyemaian dan pemanenan
  - 1) Melaksanakan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Goes to Ponpes pada 10 Pondok Pesantren di 8 Kabupaten / Kota bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten yaitu pada tanggal 28 Maret 2024.
  - 2) Melaksanakan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Goes to Ponpes pada 10 Pondok Pesantren di 8 Kabupaten / Kota bertempat di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Banten yaitu pada tanggal 30 Mei 2024.
  - 3) Melaksanakan Gerakan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Goes to Ponpes pada 10 Pondok Pesantren di 8 Kabupaten / Kota bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten yaitu pada tanggal 24 Juni 2024
- c. pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pencapaian Skor Pola Pangan Provinsi - Koordinas dan Konsultasi PPH ke BAPANAS RI Jakarta - Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan PPH ke Provinsi Jawa Barat tanggal 26-28 Juni 2024

### **III. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
  - Mengusulkan Draft Keputusan Gubernur Banten tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Banten ke Biro Hukum Provinsi Banten pada Bulan Mei 2024. Pada bulan Juni 2024 dalam proses penandatanganan gubernur.
  - Pembentukan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi banten Tahun 2024
  - Melaksanakan Pembentukan Tim Penyusun Peta Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tahun 2024 pada Selasa tanggal 11 Juni 2024
  - Sosialisasi/Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta

## Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 pada tanggal 22 Mei 2024.



### 2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

Rapat Persiapan dilakukan untuk membahas mengenai pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada sub kegiatan pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi. Kegiatan ini meliputi sosialisasi gerakan selamatkan pangan, pembagian telur dan susu pada remaja dan ibu hamil. Dalam rapat persiapan ini juga kami menyusun timeline pelaksanaan kegiatan sehingga target kinerja setiap bulannya dapat tercapai. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi memiliki satu kegiatan yakni Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000 pada tahun 2024. Pelaksanaan intervensi difokuskan pada pembinaan kewaspadaan pangan dan gizi serta pemberian bantuan pangan berupa susu dan telur.

Pelaksanaan kegiatan akan di fokuskan pada lokasi daerah dengan status waspada berdasarkan peta SKPG Provinsi dan akan mempertimbangkan hasil analisis peta SKPG Kabupaten/Kota. Hasil analisis SKPG juga akan di rekap dan dibuat kalender SKPG untuk melihat daerah yang selalu atau sering berada pada status waspada baik secara komposit maupun per 57able57tor. Hal ini dilakukan agar lokus dari pelaksanaan pembinaan kewaspadaan pangan dan gizi sudah sesuai dengan kondisi wilayahnya sehingga bantuan yang diberikan akan tepat sasaran.

Kegiatan pemberian tambahan makanan berupa telur dan susu akan difokuskan kepada anak sekolah dan ibu hamil guna

mempertimbangkan penanganan stunting. Pemberian bantuan dilakukan pada 150 siswa dan 150 ibu hamil di daerah waspada rawan pangan diharapkan agar dapat meningkatkan status gizi ibu hamil dan calon ibu hamil sehingga gizi ibu hamil dan remaja dapat dipenuhi secara maksimal.

Gerakan Selamatkan Pangan merupakan salah satu kegiatan yang sudah diinisiasi sejak tahun 2023 dimana Dinas Ketahanan Pangan mengajukan surat edaran Sekretaris Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan kampanye gerakan selamatkan pangan dengan stop boros pangan di Kabupaten/Kota.

Gerakan Selamatkan Pangan akan dilaksanakan dalam bentuk vlog dengan memulai sosialisasi sejak bulan april agar pelaksanaan lomba vlog sudah terinformasi. Pelaksanaan lomba vlog akan dimulai dengan penentuan juri dan rapat persiapan dengan juri untuk membahas mengenai kriteria peserta, kriteria penilaian dan teknis pelaksanaan lomba.

Lomba vlog dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan edukasi melalui media sosial untuk dapat menanamkan pentingnya gerakan selamatkan pangan melalui stop boros pangan yang dapat dimulai dari diri sendiri. Kampanye ini juga dapat dilakukan di hotel-hotel dan restoran serta pada anak sekolah. Gerakan ini dilaksanakan karena banyaknya sampah makanan yang terbuang sebelum dikonsumsi sedangkan disisi lain masih banyak masyarakat yang konsumsi pangannya masih jauh dari cukup atau kekurangan pangan.

Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan yang didukung oleh anggaran APBN perlu melaksanakan Ramadhan Ceria yang akan dilaksanakan pada minggu berikutnya sehingga perlu dipersiapkan bahan sosialisasi yang akan digunakan pada kegiatan tersebut. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan FoI sebagai NGO yang banyak bergerak dalam kampanye stop boros pangan. Pada wilayah Provinsi Banten, FoI sudah banyak bergerak di Tangerang.

Pelaksanaan APBD Tahun 2024 pada sub kegiatan Koodinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi provinsi

direncanakan akan selesai pada bulan November 2024 dan penyusunan laporan dan dokumen pendukung lainnya harus diselesaikan pada bulan Desember.

Hasil dari Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan salah satu kunci dalam mempercepat upaya pengendalian kewaspadaan pangan dan gizi.
2. *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah persentase populasi yang mengkonsumsi 59able59 kurang untuk hidup sehat dan tetap aktif sesuai dengan standar minimum.
3. Tahun 2023, Capaian PoU Indonesia mengalami perbaikan menjadi 8,53% dari tahun 2022 (10.21%), meskipun masih belum mencapai target RPJMN sebesar 5.2% (tahun 2023).
4. Sebanyak 14,71% atau 5 provinsi mencapai target RPJMN 2022 (Provinsi Kalsel, Bali, DKI Jakarta, Banten, NTB).
5. Sebanyak 35,29% atau 12 provinsi berada dibawah angka PoU nasional (Provinsi Sulbar, Jatim, Sulsel, Sulbar, Sumsel, Sulut, Jabar, Kalsel, Bali, Banten, DKI Jakarta dan NTB).
6. SKPG Digunakan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi serta mewujudkan ketahanan pangan, pencegahan kerawanan pangan dan gizi, termasuk stunting.
7. SKPG terdiri dari 4 aspek yakni ketersediaan, harga, pemanfaatan dan pendukung. Perolehan data untuk aspek ketersediaan berasal dari Dinas Pertanian, data harga berasal dari Dinas Pangan, data pemanfaatan berasal Dinas Kesehatan sementara data pendukung berasal dari BPBD dan BMKG.
8. Tim SKPG Provinsi dan Kabupaten Kota sebaiknya memberika laporan berkala disertai rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil SKPG bulan tersebut. Laporan dari tim SKPG di sampaikan kepada kepala dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Dinas terkait dapat melakukan Pelaksanaan Rekomendasi Kebijakan oleh Dinas terkait sesuai arahan Kepala Daerah.

9. Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi bulanan merupakan hasil komposit dari aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.
10. Panduan penggunaan aplikasi SKPG Berbasis Web dapat dilihat pada  
linkberikut:[https://drive.google.com/drive/folders/1FBKedrc9vdWsuCqGpTSp\\_n7N7XifXUBj?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1FBKedrc9vdWsuCqGpTSp_n7N7XifXUBj?usp=drive_link)
11. Data hasil penginputan yang sudah dilakukan oleh provinsi/Kabupaten/ Kota akan disapprove oleh admin pusat.
12. Petunjuk 60able60tor untuk Perkotaan atau kota adalah wilayah yang memiliki total nilai/skor 10 (sepuluh) atau lebih untuk kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/keterjangkauan pada fasilitas perkotaan yang dimiliki (BPS, 2010). Untuk wilayah perkotaan, 60able60tor yang digunakan hanya menggunakan aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, tanpa menginputkan 60able60tor ketersediaan.
13. Berdasarkan hasil kajian, untuk wilayah-wilayah non tanaman Pangan seperti wilayah perkebunan, nelayan, peternakan dan perkotaan, harga beras merupakan 60able60tor yang kuat untuk memprediksi kemungkinan terjadinya Kerawanan Pangan dan/atau Kerawanan Pangan dan Gizi karena pola konsumsi Pangan di wilayah ini cenderung pola tunggal beras (WFP, 2016), sehingga untuk wilayah perkotaan hanya menggunakan aspek keterjangkauan Pangan dan pemanfaatan Pangan.
14. Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi mengacu pada Perbadan No. 16 Tahun 2022.
15. Indikator SKPG :
  - a. Luas tanam komoditas pangan bulan berjalan
  - b. Luas tanam komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir
  - c. Luas puso komoditas pangan bulan berjalan
  - d. Luas puso komoditas pangan bulan berjalan 5 tahun terakhir
  - e. Harga beras medium
  - f. Harga jagung pipilan kering
  - g. Harga minyak goreng kemasan

- h. Harga gula konsumsi
  - i. Harga daging ayam ras
  - j. Harga telur ayam ras
  - k. Data harga mencakup harga bulan berjalan dan data harga 3 (tiga) bulan sebelumnya
  - l. BB sangat kurang
  - m. BB kurang
  - n. BB normal
  - o. Risiko BB lebih
  - p. Data status Gizi balita pada bulan berjalan
16. Praktik Penyusunan dan Analisis SKPG meliputi pengenalan lembar kerja Excel SKPG, pengisian lembar kerja excel SKPG, pengisian table data, pembuatan peta dengan quantum gis, analisa data dan penyusunan rekomendasi, dan penyusunan laporan.
- Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan system peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)



Pembinaan daerah rentan rawan pangan di laksanakan di 3 lokasi yakni:

- a. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dengan mengundang aparatur dari Kota Serang dan Kabupaten Serang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 dengan Narasumber Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang;
- b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang dengan mengundang Aparatur di lingkungan Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni

2024 dengan narasumber Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, serta Kepala Bidang Distribusi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.

- c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dengan mengundang Aparatur di lingkungan Kabupaten Tangerang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dengan narasumber Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Kepala Dinas Pertanian dan Kerawanan Pangan Kabupaten Tangerang dan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang.

Pembinaan Daerah Rentan Rawan Pangan di fokuskan pada lokasi penyaluran bantuan beras fortivit yang diambil dari hasil analisis FSVA Tahun 2023. Pembinaan terhadap masyarakat yang berada di wilayah rentan rawan pangan perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perubahan pola pikir untuk menumbuhkembangkan suatu wilayah yang tahan pangan. Untuk itu, pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya perlu ditingkatkan salah satunya melalui kegiatan pembinaan.



#### **IV. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

1. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
  - Pengawasan produk PSAT yang paling banyak dikonsumsi penduduk dilakukan pada PSAT yang dikonsumsi dalam jumlah besar dengan frekuensi tinggi. Hasil pengawasan residu pestisida

pada sayur dan buah dilakukan di pasar tradisional dan ritel modern.

Tujuan : ✓ Melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan PSAT di Peredaran dalam rangka meningkatnya keamanan pangan segar.

Sasaran Kegiatan : ✓ Sasaran dari kegiatan pengawasan keamanan dan mutu PSAT adalah pelaku usaha yang menangani PSAT , meliputi pedagang di pasar tradisional dan retail modern

- Telah melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha PSAT merupakan wujud tanggung jawab dalam melaksanakan system pengawasan keamanan pangan melalui pengaturan, standarisasi, penilaian dan inspeksi keamanan pangan serta edukasi kepada konsumen dan industri pangan. Pelaku usaha pangan memiliki peran dan tanggung jawab terhadap keamanan pangan selama di peredaran untuk memastikan pangan tetap aman di sepanjang rantai pangan serta menjaga mutu dan keamanan produk pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk serta pemberian jaminan keamanan pangan bagi masyarakat dan dapat mengimplementasikan regulasi terkait penanganan pangan segar terutama untuk sanitasi dan hygiene serta label/iklan pada kemasan pangan dalam rangka menjamin kualitas dan keamanan produk pangan pada setiap rantai pangan di daerah.

Dokumentasi Pembinaan Pelaku Usaha PSAT, tangga, 25 Mei 2024



- Pengawasan dan Pemantauan PSAT

Pengawasan Bulan April :

- 1) Hero Supermarket Kota Cilegon
- 2) Pasar Badak Kab. Pandeglang
- 3) Pasar Bintaro Kota Tangsel

4) Pasar Rau Kota Serang

Pengawasan Bulan Mei

5) Pasar Petir Kabupaten Serang

6) Pasar Serpong Kota Tangsel

7) Pasar Banjarsari dan Grosir Kahlisa Kota Serang

Pengawasan Bulan Juni :

8) Pasar Badak Kabupaten Pandeglang

9) Foodmart Karawaci Kabupaten Tangerang

10) Pasar Lama Kota Serang

11) Pasar Sampay Kabupaten Lebak

❖ Hasil Pengawasan di Pasar Sampay Kabupaten Lebak

✓ Berdasarkan pengamatan menggunakan check list standar sanitasi hygiene penanganan yang baik kondisi sanitasi pasar serta sarana dan prasarana pasar sudah cukup baik untuk skala pasar tradisonal.

✓ Sudah ada zonasi atau pemisahan tempat komoditas sesuai jenisnya walaupun belum ada plank atau keterangan tertulis di pasar.

✓ Bedasarkan hasil pengujian secara kualitatif dari sampel yang diambil, sampel tidak mengandung residu pestisida.

✓ Pengelola pasar sangat kooperatif untuk perbaikan pasar ke depan

❖ Rencana tindak lanjut

✓ Perlu adanya sosialisasi serta penyebaran informasi tentang cara /standar penanganan PSAT baik kepada para pedagang maupun pengelola pasar.

✓ Perlu adanya dukungan dari berbagai stake holder/instansi terkait dalam penyediaan fasilitas serta sarana pendukung kegiatan di pasar untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen.

✓ Perlu adanya koordinasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait

## Dokumentasi Pengawasan PSAT di Pasar Tradisional



## Dokumentasi Pengawasan PSAT di Supermarket (Pasar Modern)



### 2. Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

a. Rapat Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) pada tanggal 1 Februari 2024 dilakukan sebanyak 6 kali selama 1 tahun. Jenis kegiatan yang dilaksanakan pada Pertemuan Komisi Teknis dalam Penentuan Sertifikat dan Registrasi (No. Pendaftaran) PSAT, Pada pertemuan OKKPD membahas tentang pengajuan Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) PT. WIJAYA PANGAN NUSANTARA menghasilkan Berita Acara Keputusan Komtek. Temuan dilapangan sudah diperbaiki setelah dilakukan audit di lokasi penanganan PSAT. Setelah sidang Komtek didapatkan hasil bahwa Rewiewer Merekomendasikan untuk memperoleh Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik pada PSAT (SPPB-PSAT), sebagai berikut :

- Nama PSAT : 1. Kacang-kacangan
- 2. Bumbu Dapur/Rempah-rempah
- 3. Beras umum (Premium dan Medium)
- 4. Beras Khusus

- Level SPPB-PSAT : Level 2 (Dua)
- Ruang Lingkup : 1. Penyimpanan Suhu Ruang  
2. Pengemasan Ulang
- Status Kepemilikan : Milik Sendir

b. Audit/Penilaian lapangan Penerapan Penanganan Yang Baik (SPBB) PSAT dan Penyebarluasan Data Informasi Sertifikasi PSAT samapai denga semester I :

- Audit/Penilaian lapang izin jaminan mutu hidroponik ke Swanto Wijaya Farm. Kab. Tangerang pada tanggal 19 Januari 2024 dalam rangka
- Audit/Penilaian penerapan yang baik (SPPB) PSAT ke PT. Lotte Shopping Indonesia, Kota Tangerang 8 Maret 2024 dalam rangka

#### Dokumentasi Audit/Penilaian



c. Rekapitulasi Sertifikat Dan Register PSAT Sampai Dengan Bulan Maret (Triwulan I) Tahun 2024 Melalui OSS DAN SIPEKA:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Sertifikasi Prima 3	0
2.	Sertifikat Jaminan Mutu Hidroponik	0
3.	Sanitasi Higiene (SPPB)	3
4.	Health Certificate (HC)	0
5.	Izin Edar PSAT-PD	32
6.	Sertifikasi Rumah Kemas	0
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>

Dinas Ketahanan Pangan														
REGKAPITULASI JUMLAH REGISTER PSAT-PDUK MELALUI OSS DAN MANUAL DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024														
NO	KABUPATEN/KOTA	NOMOR REGISTRASI PSAT-PDUK YANG DITERBITKAN												
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0	0	0							0
2	Kabupaten Pandeglang	4	1	0	0	0	0							5
3	Kabupaten Serang	0	0	0	0	0	0							0
4	Kabupaten Lebak	0	0	0	0	1	0							1
5	Kabupaten Tangerang	0	0	0	0	0	3							3
6	Kota Tangerang	0	0	0	0	0	4							4
7	Kota Cilegon	0	0	0	0	0	0							0
8	Kota Serang	0	0	0	0	0	0							0
JUMLAH		4	1	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	13

REKAPITULASI JUMLAH SERTIFIKAT DAN REGISTER PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) PER BULAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024										
NO.	BULAN	SISTEM PELAYANAN IZIN ELEKTRONIK TERBUKA (SIPEKA)			JUMLAH	ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)			JUMLAH	TOTAL
		PRIMA 3 DAN PRIMA 2	JAMINAN MUTU HYDROPONIK	IZIN HEALTH CERTIFICATE (HC)		IZIN SANITASI HIGIENE (SPPB)	IZIN RUMAH KEMAS (PH)	IZIN EDAR PSAT PD DAN PDUK		
1	Januari	0	0	0	0	1	0	23	24	24
2	Februari	0	0	0	0	1	0	3	4	4
3	Maret	0	0	0	0	1	0	11	12	12
4	April	0	0	0	0	1	0	5	6	6
5	Mei	0	1	0	1	0	1	5	6	7
6	Juni	0	0	0	0	0	0	21	21	21
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	1	0	1	4	1	68	73	74

REKAPITULASI JUMLAH SERTIFIKAT DAN REGISTER PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024											
NO.	KABUPATEN/KOTA	SERTIFIKASI					REGISTRASI			JUMLAH	TOTAL
		PRIMA 3	JAMINAN MUTU HYDROPONIK	SANITASI HIGIENE (SPPB)	HEALTH CERTIFICATE (HC)	RUMAH KEMAS	JUMLAH	PSAT-PD	PSAT-PDUK		
1	Kabupaten Lebak	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	Kabupaten Pandeglang	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
3	Kabupaten Serang	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3
4	Kabupaten Tangerang	0	1	0	0	1	2	25	3	28	30
5	Kota Cilegon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Tangerang	0	0	2	0	2	15	4	19	21	
7	Kota Serang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kota Tangsel	0	0	2	0	0	2	12	0	12	14
JUMLAH		0	1	4	0	1	6	55	13	68	74

REKAPITULASI CAPAIAN SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN REKOMENDASI HASIL SURVEILAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI PROVINSI BANTEN SEMESTER I TAHUN 2024 (BERDASARKAN TARGET DPA)							
NO	BULAN	TARGET			REALISASI		
		SERTIFIKASI PSAT	REGISTRASI PSAT	REKOMENDASI HASIL SURVEILAN PSAT	SERTIFIKASI PSAT	REGISTRASI PSAT	REKOMENDASI HASIL SURVEILAN PSAT
1	Januari	1	0	0	1	23	0
2	Februari	1	14	2	1	3	2
3	Maret	1	0	1	1	11	1
4	April	1	0	2	1	5	2
5	Mei	1	0	3	2	5	3
6	Juni	1	3	1	0	21	1
Jumlah		6	17	9	6	68	9

REKAPITULASI CAPAIAN SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN REKOMENDASI HASIL SURVEILAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 (BERDASARKAN TARGET DPA)							
NO	BULAN	TARGET			REALISASI		
		SERTIFIKASI PSAT	REGISTRASI PSAT	REKOMENDASI HASIL SURVEILAN PSAT	SERTIFIKASI PSAT	REGISTRASI PSAT	REKOMENDASI HASIL SURVEILAN PSAT
1	Januari	1	0	0	1	23	0
2	Februari	1	14	2	1	3	2
3	Maret	1	0	1	1	11	1
4	April	1	0	2	1	5	2
5	Mei	1	0	3	2	5	3
6	Juni	1	3	1	0	21	1
7	Juli	1	3	0			
8	Agustus	1	3	0			
9	September	2	3	2			
10	Oktober	1	4	2			
11	Nopember	2	0	2			
12	Desember	2	0	0			
Jumlah		15	30	15	6	68	9

CAPAIAN KINERJA SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN REKOMENDASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024 (BERDASARKAN TARGET RENSTRA)								
NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		2023	2023	2024	2024	KOMULATIF	KOMULATIF	
1	SERTIFIKASI	25	27	25	6	50	33	66.00
2	REGISTRASI	75	128	75	68	150	196	130.67
JUMLAH		100	155	100	74	200	229	114.50
3	REKOMENDASI	0	0	15	9	15	9	60.00
JUMLAH		0	0	15	9	15	9	60.00

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah provinsi Banten pada Triwulan II, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 masih belum memenuhi target, dikarenakan banyak capaian target dari indicator sub kegiatan khususnya pada bidang teknis akan tercapai pada akhir tahun, namun untuk reencana aksi sub kegiatan pada bulan ini sudah hampir mencapai target..

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI BANTEN**  
**Dr. Ir. Hj. AAN MUAWANAH,MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640614 199803 2 001